



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 28 Maret 2018

Nomor : 130/0663.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Buku)
Hal : LKjIP Kabupaten
Kebumen Tahun 2017

Kepada
Yth. Presiden RI
u.p. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di –

JAKARTA

Mendasari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KEBUMEN
Plt. SEKRETARIS DAERAH
INSPEKTUR


Drs. H. MAHMUD FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610109 1991021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DIY di Yogyakarta
4. Bupati Kebumen (sebagai laporan)



LKjIP Tahun 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah subhana wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebumen, Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumus perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 6 Misi, 11 Tujuan, 16 Sasaran dan 26 Indikator Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun kedua (2017) periode perencanaan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 7 Indikator sasaran atau 100% kategori baik sekali (melampaui target).
- ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) Indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali (melampaui target) dan 2 (dua) indikator sasaran atau 66,67% kategori baik (mencapai target).
- ❖ Misi III terdapat 4 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 (empat) Indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target) , 3 (tiga) indikator sasaran atau 37,5% kategori baik dan 1 (satu) indikator sasaran atau 1,25 % kategori kurang.

- ❖ Misi IV terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 1 (satu) Indicator sasaran atau 50% kategori baik, 1 (satu) indicator sasaran atau 50% kategori kurang.
- ❖ Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 2 (dua) Indicator sasaran atau 100% kategori baik sekali (melampaui target).
- ❖ Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja:
 - Capaian indicator sasaran, sebanyak 4 (empat) Indicator sasaran 100% kategori baik.

Berkenaan dengan ketercapaian indicator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Hasil analisis pencapaian indicator sasaran terhadap 16 (enam belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indicator sasaran, diketahui bahwa 14 Indicator sasaran atau 53,85 % Baik Sekali, 10 Indicator sasaran atau 38,46% Baik, dan 2 Indicator sasaran atau 7,7% Kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 95,46% atau bermakna baik. Jadi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 Baik, Capaian kinerja tahun 2017 mencapai 95,46%, mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 yang mencapai 122,33%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	1
1.1.1. Aspek Geografis	1
1.1.2. Topografi.....	4
1.1.3. Hidrogeologi	5
1.1.4. Klimatologi.....	5
1.1.5. Penggunaan Lahan	6
1.1.6. Aspek Demografi	6
1.2. Organisasi Perangkat Daerah	10
1.2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
1.2.2. Sumber daya aparatur	13
1.3. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan Daerah	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Aspek Perencanaan	21
2.1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan.....	21
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen	47
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja.....	49
3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017	118
BAB IV PENUTUP	127
4.1. Kesimpulan	127
4.2. Solusi	127



LAMPIRAN

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen 2016-2021



DAFTAR TABEL

1.1. Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan Tahun 2016.....	9
1.2. Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan Non Guru	13
1.3. Jumlah PNS menurut jabatan structural	14
1.4. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan (Non Guru)	14
1.5. Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan	14
2.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	25
2.2. Ringkasan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	27
2.3. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1	32
2.4. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2	33
2.5. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3	34
2.6. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4	37
2.7. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5	38
2.8. Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-6	39
2.9. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	41
2.10. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen 2017	45
3.1. Skala Pengukuran Ordinal.....	47
3.2. Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran/ IKU Kabupaten.....	48
3.3. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	50
3.4. Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi	54
3.5. Capaian Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	55
3.6. Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga.....	57
3.7. Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional	57
3.8. Capaian Angka Harapan Hidup.....	58
3.9. Capaian Angka Kematian Ibu.....	61
3.10. Perbandingan Angka Kematian Bayi	64
3.11. Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an	67
3.12. Capaian Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah.....	67
3.13. Rincian indicator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	69
3.14. Capaian Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	69
3.15. Capaian Kasus Pelanggaran Hukum	72
3.16. Rincian Perda-perda yang ditegakkan	72
3.17. Capaian Pertumbuhan ekonomi.....	76
3.18. Capaian Kinerja Pendapatan perkapita penduduk	77
3.19. Capaian Rasio/ Indeks Gini.....	79
3.20. Capaian Indikator kinerja Pembentukan kawasan perdesaan.	80



3.21. Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	83
3.22. Capaian Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2017	85
3.23. Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Dan Non Pemerintah Daerah Realisasi Pengunjung Tahun 2013 – 2017	87
3.24. Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Wilayah	88
3.25. Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (dalam kilometer)	89
3.26. Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017	90
3.27. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	93
3.28. Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan	97
3.29. Angkatan Kerja	101
3.30. Capaian Angka Pengangguran	101
3.31. Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen	103
3.32. Capaian Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik.....	103
3.33. Capaian Kinerja Tingkat akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	106
3.34. Capaian Nilai EKPPD	107
3.35. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	110
3.36. Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD	113
3.37. Realisasi Nilai Opini BPK atas LKPD 2013-2017	116
3.38. Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat	117
3.39. Capaian Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	117
3.40. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	121
3.41. Realisasi Belanja daerah tahun 2017	124
3.42. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017.....	126



DAFTAR GAMBAR

1.1.	Peta Wilayah Kabupaten Kebumen.....	3
1.2.	Topografi Kabupaten Kebumen	4
1.3.	Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	7
3.1.	Angka Harapan Lama Sekolah	51
3.2.	Rata-rata Lama Sekolah.....	53
3.3.	Prosentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	56
3.4.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen 2013-2017	59
3.5.	Perbandingan Angka Harapan Hidup	59
3.6.	Angka Kematian Ibu 2013-2017.....	62
3.7.	Perbandingan Angka Kematian Ibu 2012-2015.....	62
3.8.	Angka Kematian Bayi 2013-2017	64
3.9.	Perbandingan Angka Kematian Bayi.....	65
3.10.	Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah Tahun 2013 – 2017.....	68
3.11.	Kasus Pelanggaran Hukum 2015-2017	74
3.12.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017 dan Pencapaian Target RPJMD.....	74
3.13.	Perkembangan PDRB PerKapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (Rp. Juta).....	78
3.14.	Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016	80
3.15.	Pembentukan Kawasan Perdesaan	82
3.16.	Realisasi Investasi PMA/ PMDN 2015-2017.....	83
3.17.	Kunjungan Wisata	85
3.18.	Grafik Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	91
3.19.	Perbandingan IKLH	95
3.20.	Perbandingan Angka Kemiskinan Se- Kedu	98
3.21.	Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2013 -2017	98
3.22.	Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen 2015-2017.....	104
3.23.	Nilai EKPPD 2014-2016	108
3.24.	Perbandingan Nilai EKPPD Karisedenan Kedu 2016	109
3.25.	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2013-2017.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Sampai akhirnya ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah.

Secara umum, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1.1.1. Aspek Geografis

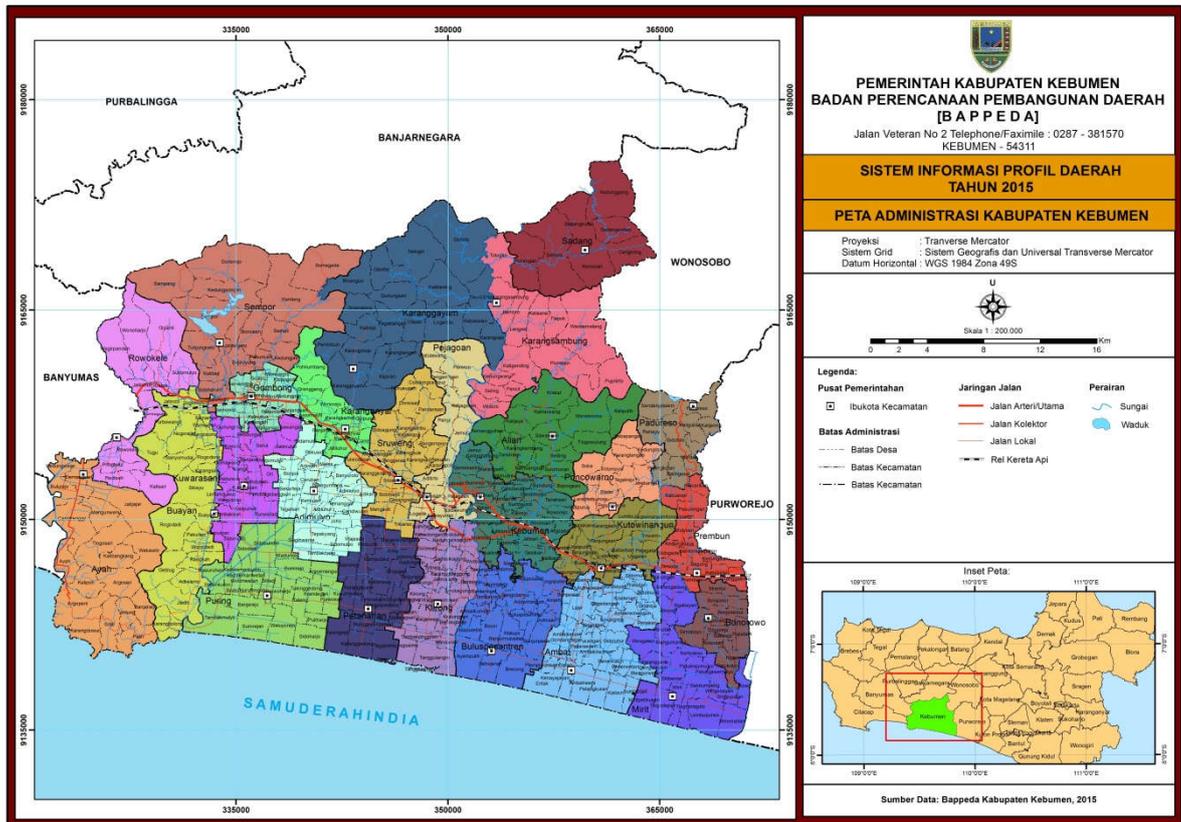
Kabupaten Kebumen merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain:

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo; dan

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan memanjang di pulau Jawa bagian Selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada $7^{\circ}27'$ - $7^{\circ}50'$ (tujuh koma dua puluh tujuh derajat sampai dengan tujuh koma lima puluh derajat) Lintang Selatan dan $109^{\circ}22'$ - $109^{\circ}50'$ (seratus sembilan koma dua puluh dua derajat sampai dengan seratus sembilan koma lima puluh derajat) Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.



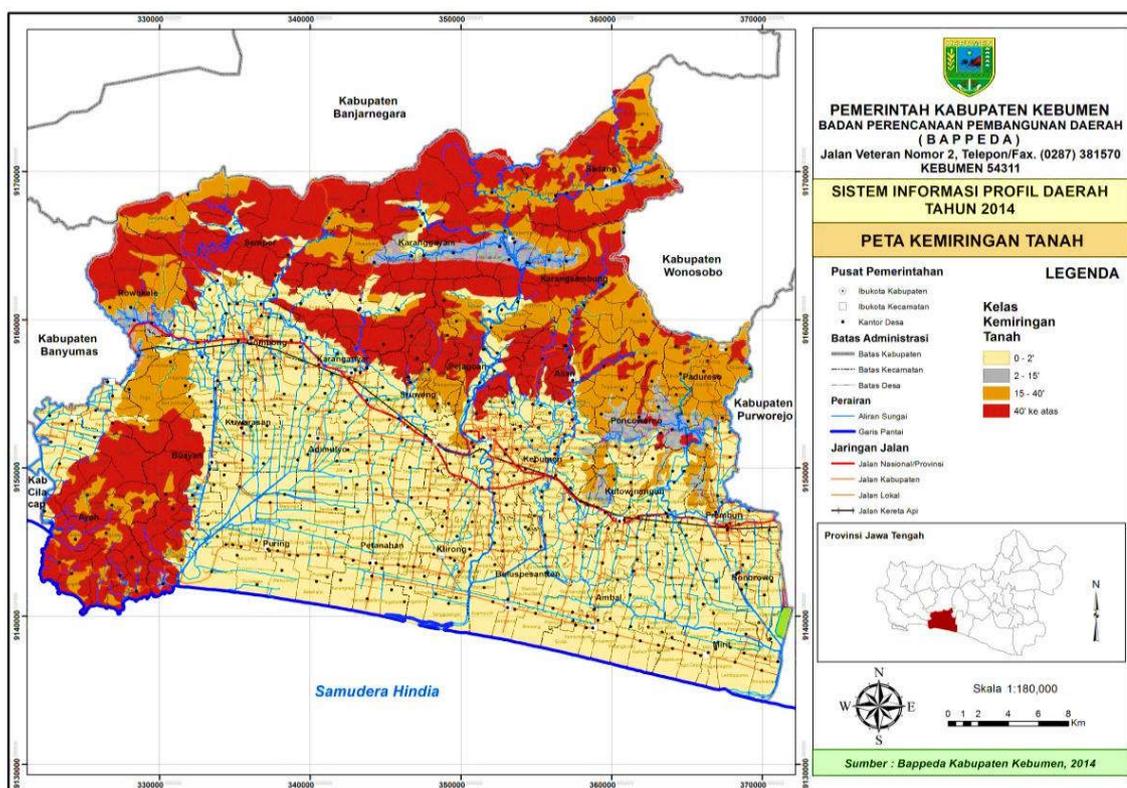
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kebumen

Sumber: Profil Daerah, 2015

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, dan 11 (sebelas) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas) hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi (lihat gambar 2,1). Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan wilayah pantai.

1.1.2. Topografi

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.2

Topografi Kabupaten Kebumen

Sumber: Profil Daerah, 2015

1.1.3. Hidrogeologi

Kabupaten Kebumen di bagian selatan, sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah karst ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas. Di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsembung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada Bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2012 sebesar 2.249,50 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma lima puluh) milimeter pertahun, temperatur udara berada pada kisaran 17-35^oC (tujuh belas sampai dengan tiga puluh lima derajat celcius). Kelembaban udara rata-rata 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-rata 3,13 (tiga koma tiga belas) knot.

1.1.5. Penggunaan Lahan

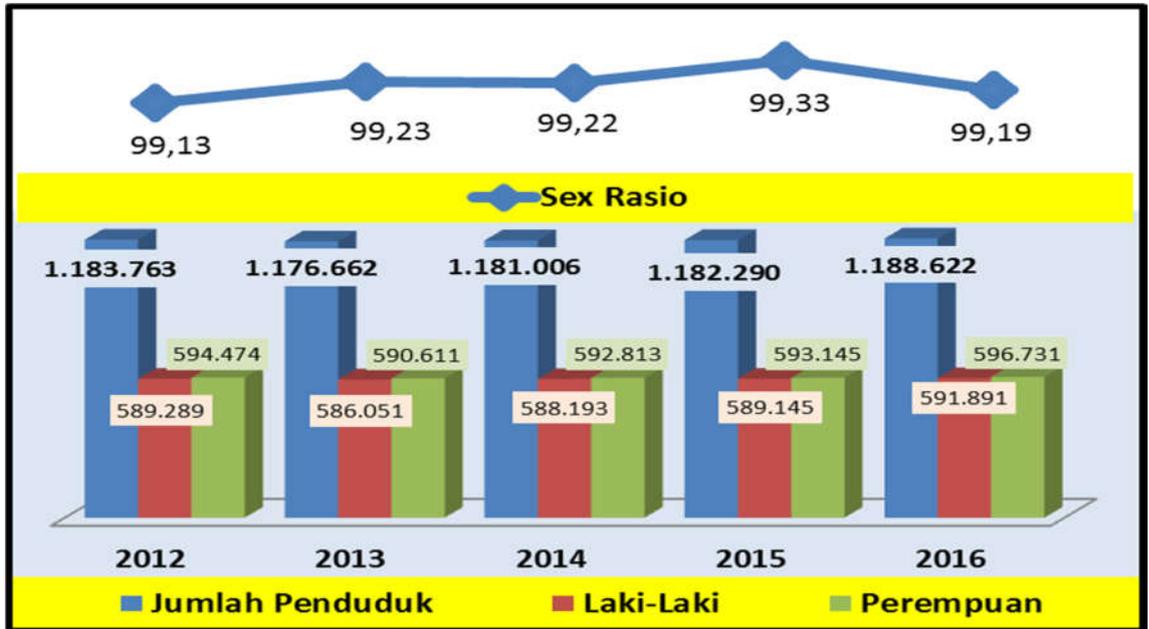
Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar atau sekitar 31,03% (tiga puluh satu koma nol empat persen) adalah lahan sawah dan 88.363,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,97% (enam puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) adalah lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas 42.799,50 hektar dan bukan lahan pertanian mencapai 45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut sebagian besar untuk tegalan/ kebun mencapai 27.629,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas 16.861,00 hektar.

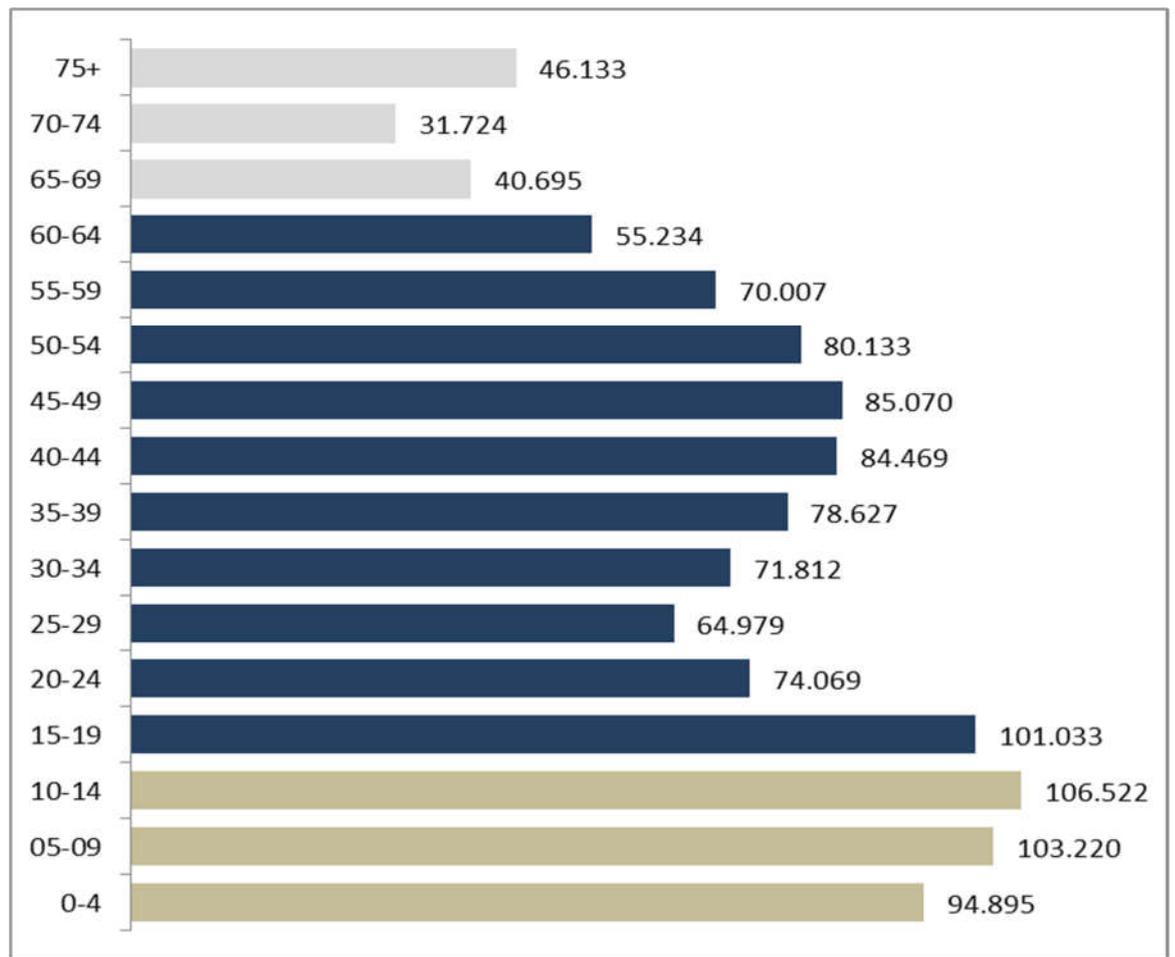
1.1.6. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.188.622 jiwa, tumbuh sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga sebanyak 322.695 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 928 jiwa/km², dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah

terpadat penduduknya dengan kepadatan 2.896 jiwa/km² dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan 338 jiwa/km².



Gambar 1.3
Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)



Gambar 1.4

Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 591.891 jiwa dan perempuan sebanyak 596.731 jiwa, sehingga angka *sex ratio* sebesar 99,19 artinya komposisi penduduk laki-laki 0,99 persen lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan *sex ratio* di bawah 100 (seratus) dimungkinkan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari kalangan laki-laki.

Sedangkan apabila dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke atas, menunjukkan komposisi demografi penduduk di kabupaten Kebumen pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 765.433 jiwa dan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 423.819 jiwa. Angka beban ketergantungan pada tahun 2016 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 55,28. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 55-56 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukkan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.

a.

Tabel 1.1 Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Karanggayam	24.756	24.162	48.918
Ayah	28.004	27.757	55.761
Buayan	27.219	27.469	54.688
Puring	26.834	26.439	53.273
Petanahan	26.867	26.462	53.329
Klirong	27.433	27.275	54.708
Buluspesantren	26.436	26.316	52.752
Ambal	27.862	27.453	55.315
Mirit	22.390	22.236	44.626
Bonorowo	9.385	9.490	18.875
Prembun	13.056	13.537	26.593
Padureso	6.633	6.821	13.454
Kutowinangun	20.839	21.755	42.594
Alian	27.227	27.365	54.592
Poncowarno	7.329	7.733	15.062

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Kebumen	60.663	61.083	121.746
Pejagoan	24.320	24.171	48.491
Sruweng	26.678	27.304	53.982
Adimulyo	16.816	17.646	34.462
Kuwarasan	22.097	22.369	44.466
Rowokele	21.140	21.604	42.744
Sempor	29.506	30.330	59.836
Gombong	23.361	24.466	47.827
Karanganyar	16.860	17.476	34.336
Sadang	9.345	8.993	18.338
Karangsambung	18.835	19.019	37.854
Total	591.891	596.731	1.188.622

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

1.2. Organisasi Perangkat Daerah

1.2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari :

Sekretaris Daerah di bantu oleh

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Bagian Perekonomian
 - b) Bagian Pembangunan
- 3) Asisten Administrasi
 - a) Bagian Organisasi



- b) Bagian Umum
- c) Bagian Hukum
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Kesehatan tipe B
 - 2) Dinas Pendidikan tipe A
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B
 - 6) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B
 - 10) Dinas Perhubungan tipe B
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A
 - 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C
 - 14) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B
 - 15) Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C
 - 17) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B
- d. Badan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A



- 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B
- 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B
- e. Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Inspektorat tipe A
- g. Rumah Sakit Umum Daerah
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Ayah tipe A
 - 2) Kecamatan Pejagoan tipe A
 - 3) Kecamatan Rowokele tipe A
 - 4) Kecamatan Kebumen tipe A
 - 5) Kecamatan Buayan tipe A
 - 6) Kecamatan Karangsembung tipe A
 - 7) Kecamatan Sempor tipe A
 - 8) Kecamatan Sadang tipe A
 - 9) Kecamatan Gombong tipe A
 - 10) Kecamatan Alian tipe A
 - 11) Kecamatan Kuwarasan tipe A
 - 12) Kecamatan Poncowarno tipe A
 - 13) Kecamatan Puring tipe A
 - 14) Kecamatan Buluspesantren tipe A
 - 15) Kecamatan Adimulyo tipe A
 - 16) Kecamatan Kutowinangun tipe A
 - 17) Kecamatan Karanganyar tipe A
 - 18) Kecamatan Ambal tipe A
 - 19) Kecamatan Karanggayam tipe A
 - 20) Kecamatan Mirit tipe A
 - 21) Kecamatan Sruweng tipe A
 - 22) Kecamatan Bonorowo tipe A

- 23) Kecamatan Petanahan tipe A
- 24) Kecamatan Prembun tipe A
- 25) Kecamatan Klirong tipe A
- 26) Kecamatan Padureso tipe A

j. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Gombang
- 2) Kelurahan Kebumen
- 3) Kelurahan Wonokriyo
- 4) Kelurahan Tamanwinangun
- 5) Kelurahan Karanganyar
- 6) Kelurahan Selang
- 7) Kelurahan Panjatan
- 8) Kelurahan Panjer
- 9) Kelurahan Jatiluhur
- 10) Kelurahan Bumirejo
- 11) Kelurahan Plarangan

1.2.2. Sumber daya aparatur

Secara kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah di Kabupaten Kebumen dapat di lihat dari jumlah pegawai dengan di dasarkan pada tingkat golongan dan tingkat pendidikan pegawai.

Dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2017 berjumlah 12.079 pegawai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan Non Guru

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	
		2016	2017
1.	I	383	282
2.	II	2.108	2.073
3.	III	3.028	2.907
4.	IV	476	494
	Jumlah :	5.886	5.666

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen

Tabel 1.3 Jumlah PNS menurut jabatan struktural

No.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI	
		2016	2017
1.	II / a	1	0
2.	II / b	27	30
3.	III / a	62	64
4.	III/b	92	105
5.	IV/a	486	504
6.	IV/b	168	156
7.	V	56	48
J u m l a h :		892	907

Sumber : BKPPD Kabupaten Kebumen

Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan (Non Guru)

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE
1.	S 2	352	6,21%
2.	S 1	1.246	21,99%
3.	Diploma I	79	1,39%
4.	Diploma II	59	1,04%
5.	Diploma III	1.165	20,56%
6.	Diploma IV	77	1,36%
7.	S L T A	2.077	36,66%
8.	S L T P	452	7,98%
9.	SD	158	2,79%
Jumlah		5.666	100%

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen

Tabel 1.5 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	
		2016	2017
1.	I	283	222
2.	II	2.339	2.208
3.	III	6.170	5.691
4.	IV	4.527	3.958
J u m l a h :		13.319	12.079

Sumber : BKPPD Kab. Kebumen

1.3. Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan rencana kerja pemerintah daerah harus diawali dengan proses analisis yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang ada atau diperkirakan akan muncul dalam dinamika pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh tidak dilakukan, agar dokumen perencanaan yang dihasilkan senantiasa dapat menjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021, yang menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2015, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, antara lain:

1. Isu Strategis

- a. Belum optimalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. Relatif meningkatnya permasalahan sosial dan turunnya pengamalan nilai-nilai keagamaan;
- c. Belum optimalnya perekonomian daerah;
- d. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
- e. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidupserta potensi bencana yang tinggi;
- f. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- g. Masih terbatasnya kesempatan kerja; dan

- tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
- c. Tingginya permasalahan sosial, ditunjukkan dengan jumlah PMKS di Kabupaten sebanyak 210.208 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 31.393 orang, yang diberikan bantuan sebanyak 30.518 orang dari 35.568 orang yang seharusnya menerima bantuan.
 - d. Melemahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan, ditunjukkan dengan jumlah kasus narkoba dan kasus baru HIV cenderung mengalami kenaikan dengan angka masing-masing pada tahun 2011 3 kasus Narkoba dan 44 kasus baru HIV menjadi 7 kasus narkoba dan 300 kasus baru HIV pada tahun 2015.
 - e. Masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk, meskipun angkanya semakin menurun. Setelah sempat naik dari 22,70% tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (13,32%) dan Nasional (8,57%), pada tahun 2015, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen lebih tinggi.. Untuk skala provinsi, penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Secara regional/kawasan, penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 hanya lebih rendah dari Kabupaten Wonosobo dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 20,80%. Diperkirakan pada tahun 2015, angka dan peringkat penduduk miskin ini tidak mengalami banyak pergeseran.

- f. Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2014 mencapai 5,80%, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,65%, dengan seluruh kategori ekonomi PDRB mencatat pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014, di tingkat regional kawasan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen berada pada garda terdepan. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dengan perbandingan angka 5,80% berbanding 5,30%. Sedangkan bila dibandingkan dengan 6 Kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen berada pada posisi teratas.

Dilihat dari *share*/pemerataan pertumbuhan ekonomi, meskipun angkanya cenderung meningkat, Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,28 dan 0,39. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Kebumen juga berada pada posisi paling rendah (terbaik) yang menunjukkan pemerataan pendapatan paling merata.

Dilihat dari daya saing daerah, pada tahun 2013 Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 9 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Indikator-indikator yang dinilai dalam daya saing daerah ini di antaranya aspek dinamika usaha (peringkat 34), aspek infrastruktur (peringkat 16), aspek kapasitas pemerintah (peringkat 4), aspek kinerja investasi (peringkat 26), aspek

iklim bisnis (peringkat 11), aspek kinerja ekonomi (peringkat 13).

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan cukup tingginya daya saing daerah tersebut ternyata kontradiktif dengan tingkat kemiskinan penduduk yang persentasenya masih tinggi. Hal ini menjadi permasalahan yang harus mendapat prioritas penanganan.

- g. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan. Keterbatasan kualitas pelayanan terjadi pada sarana dan prasarana jalan. Kualitas prasarana jalan dan irigasi masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan jalan kondisi baik baru mencapai 52,58% pada tahun 2015. Demikian juga dengan infrastruktur jaringan irigasi di tingkat usaha tani yang masih memerlukan peningkatan kapasitas. Sementara itu, keterbatasan air bersih terjadi di kawasan pegunungan Kabupaten Kebumen. Infrastruktur sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan) juga masih menjadi permasalahan;
- h. Keberagaman konfigurasi fisik/topografikawasan/daerah membagi Kabupaten Kebumen menjadi tiga kawasan yaitu pegunungan, dataran dan pesisir. Selain menjadi modal untuk pembangunan daerah, karakteristik tersebut juga menyimpan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik wilayah dan konflik pemanfaatan ruang berdampak terhadap penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan.

- i. Ketenteraman masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang dewasa ini menunjukkan adanya semakin meningkatnya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah sehingga memerlukan kebijakan dalam pengelolaannya. Selain itu, wilayah Kabupaten Kebumen mempunyai kawasan rawan bencana alam yang dapat memberikan dampak negatif dan limitasi bagi pelaksanaan pembangunan. Di kawasan pegunungan, penduduk menghadapi ancaman tanah longsor dan kekeringan terutama pada musim kemarau. Pada kawasan pesisir, penduduk menghadapi bencana banjir dan potensi bencana tsunami.
- j. Permasalahan di bidang pemerintahan yang masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen adalah belum optimalnya kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Beberapa penyebab permasalahan tersebut adalah belum optimalnya struktur organisasi pemerintah daerah, kualitas dan kompetensi aparatur, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan asas legal pengaturan pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tampaknya juga akan cukup berdampak terhadap pelaksanaan pemerintahan, di antaranya dengan perubahan-perubahan kewenangan dan struktur organisasi pemerintah daerah. Termasuk juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang masih belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Aspek Perencanaan

2.1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh SKPD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Kebumen merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada 9 Desember 2015, adapun visi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Bersama : adalah bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama – sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.

Menuju : adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.

Sejahtera : adalah bahwa pembangunan harus berorientasi

- untuk pemenuhann kebutuhan dasar, masyarakat berupa pangan, sandang, papan, (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Unggul : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.
- Berdaya : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalm menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.
- Agamis : adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu manciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat- sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan , kebenaran, dan persaudaraan.
- Berkelanjutan : adalah bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Semua kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ini, diwujudkan dengan berbasis agrobisnis, sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Untuk mencapai visi di atas maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut, agar dapat diterapkan selama lima tahun ke depan dalam misi-misi. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan sebanyak 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rokhaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan, sinergitas antar elemen masyarakat.

Misi Ketiga : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

Misi Keempat : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses

pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Misi Kelima : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi Keenam : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kebumen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menjabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa agenda utama dan strategi pembangunan kurun waktu 2016-2021 yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kebumen Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Bupati Kebumen Tahun 2017.

Secara lebih rinci keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas		
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup 6. Angka Kematian Ibu 7. Angka Kematian Bayi
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat		
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Alquran Siswa Lulus Sekolah
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum



Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat		
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)
		12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)
		13. Rasio/Indeks Gini
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan		
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat		
10. Mewujudkan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>		
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, partisipatif, dan agamis	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		24. Nilai akuntabilitas kinerja
		25. Opini BPK atas LKPD
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Dari penjelasan di atas dapat dibuat gambaran mengenai jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN (IKU)
1	Misi 1	1	4	7
2	Misi 2	2	2	3
3	Misi 3	4	4	8
4	Misi 4	2	2	2
5	Misi 5	1	2	2
6	Misi 6	1	2	4
	Jumlah	11	16	26

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif

dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2010-2015, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

2.1.2.1. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari

unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan

Kekuatan Kabupaten Kebumen yang teridentifikasi antara lain:

- a. jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi;
- b. kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis;
- c. adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan;
- d. masih tumbuh suburnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat;
- e. kondisi geografis wilayah dengan variasi topografi pegunungan dan pantai yang memiliki pesona alam yang indah;
- f. sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya);
- g. pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan;
- h. tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi;
- i. adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan; dan
- j. adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

2. Kelemahan

Kelemahan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif;
- b. kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam;

- c. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
- d. belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar;
- e. belum optimalnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. belum optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat; dan
- h. masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya.

3. Peluang

Peluang untuk pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- a. terbukanya peluang usaha dan investasi, khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral;
- b. terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi;
- c. pemberlakuan otonomi daerah yang semakin luas bagi Pemerintah Daerah;
- d. iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang semakin tinggi;
- e. mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah;
- f. kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan;

- g. perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam; dan
- h. adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4. Ancaman

Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. dinamisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan;
- b. kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil;
- c. pengembangan kawasan Ekonomi Asia;
- d. dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
- e. terjadinya degradasi moral masyarakat; dan
- f. pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.

2.1.2.2. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Strategi Misi Ke-1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Rangkaian strategi dari misi ini, diarahkan untuk mewujudkan dan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal
				1.1.2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	1.2.1	Memper mudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1.3.1	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan
				1.4.2	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
				1.4.3	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit
				1.4.4	Meningkatkan perilaku hidup sehat
				1.4.5	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				1.4.6	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-1 yang dominan pada bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

2. Strategi Misi Ke-2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

Rangkaian strategi dari misi ke-2 ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, serta peningkatan akhlak masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-2, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama
				1.1.2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya

2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	2.1.1	Meningkatkan kordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya
----	---	-----	--	-------	---

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-2 yang dominan pada bidang sosial dan budaya, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Ketenteraman Sosial (IKS) yang diindikasikan dengan semakin menurunnya persentase pelanggaran hukum dan juga semakin meningkatnya persentase ketersediaan prasarana keagamaan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

3. Strategi Misi Ke-3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-3, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan; (ii) meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah, (iii) mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap; serta (iv) terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-3, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				1.1.2	Mengembangkan kawasan perdesaan



				1.1.3	Mengembangkan Kawasan Industri
				1.1.4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi
				1.1.5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi
				1.1.6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal
				1.1.7	Peningkatan operasi pasar
				1.1.8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat
				1.1.9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah
				1.1.10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah
				1.1.11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	2.1.1	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	2.2.1	Meningkatkan upaya penggalan dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
				3.1.2	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

				3.1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi
				3.1.4	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)
				3.1.5	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa
				3.1.6	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan
				3.1.7	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA
				3.1.8	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik
				3.1.9	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan
4.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	4.1.1	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah
5.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	5.1	Menurunnya angka pengangguran	5.1.1	Meningkatkan keterampilan masyarakat
				5.1.2	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-3 yang dominan pada bidang pengembangan infrastuktur wilayah, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menunjang dan menjadi pendorong dalam peningkatan angka

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai Indeks Daya Saing Usaha, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah, menurunkan angka pengangguran yang bernilai ekonomi serta terjadinya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

4. Strategi Misi Ke-4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

Rangkaian strategi pendukung misi ke-4, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera; (ii) untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran; (iii) untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-4, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1.1.1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-4 yang dominan pada bidang ekonomi diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

5. Strategi Misi Ke-5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rangkaian strategi pendukung misi ke-5, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-5, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1.1.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas
				1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan
		1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-5 yang dominan pada penyediaan sarana pendukung bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran indeks keterjangkauan pendidikan dan indeks keterjangkauan kesehatan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

6. Strategi Misi Ke-6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. Rangkaian strategi pendukung misi ke-6 diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-6, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sasaran dan Strategi untuk Misi
Ke-6

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah
				1.1.2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik
		1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	1.2.1	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Sasaran dari strategi pada misi ke-6 yang dominan padabidang pemerintahan ini ditujukan untuk meningkatkan indeks penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

2.1.2.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan

dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Tema tahapan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama

Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Kebumen

Secara keseluruhan arah kebijakan berdasarkan fokus tema pembangunan dijabarkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan diuraikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.9. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan prasarana olah raga.	d	Meningkatkan mutu/kualitas pembinaan olahraga dan prasarana olahraga
5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		
8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Meningkatkan akses dan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat			



1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
3	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan

1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2	Mengembangkan kawasan perdesaan	b	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3	Mengembangkan Kawasan Industri		
4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.

13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<p>Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>			
1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		

Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat			
1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan
3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Menurut prosedur yang ideal, Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap awal tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan.

Target dari indikator kinerja Sasaran ini ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan target ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat capaian kinerja/keberhasilan masing-masing Sasaran.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2017 dan telah dirubah pada tanggal 20 September 2017 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Target atau Rencana Capaiannya. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Kebumen Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen 2017

SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54
	2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,02
2. Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	56,49
3. Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	46,79
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Angka	72,85
	6. Angka Kematian Ibu	Angka	95
	7. Angka Kematian Bayi	Angka	11,00
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100
	9. Cakupan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	27,56
6. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	Kasus	750



7. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	%	5,89
	12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	Rp	19.715.600,00
	13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,23
	14. Terbangunnya kawasan pemba- ngunan ekonomi	Unit	2
8. Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan inves- tasi PMA/ PMDN	%	5,0
9. Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	17,01
10. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	54,83
11. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	66,00
12. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18,50
13. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,05
14. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	79,03
15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	94,50
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B >2 s.d < 3
	24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B
	25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP
17. Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	50,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban public.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah dapat melaksanakan tugas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 11 (sebelas) Tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran, Misi II terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran, Misi III terdapat 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran, Misi IV terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran, Misi V terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran, dan Misi VI terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 terdapat pada lampiran 4, sedangkan pencapaian indikator sasaran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran/ IKU Kabupaten

No	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	1	4	7	7	-	-	-
2	Misi 2	2	2	3	1	2	-	-
3	Misi 3	4	4	8	4	3	-	1
4	Misi 4	2	2	2	-	1	-	1
5	Misi 5	1	2	2	2	-	-	-
6	Misi 6	1	2	4	-	4	-	-
	Jumlah	11	16	26	14	10	-	2
				Prosentase	53,85%	38,46%	-	7,7%

Hasil analisis bahwa terdapat 16 (enam belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja /sasaran, diketahui bahwa 14 (empat belas) indikator sasaran atau 53,85 % pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 10 (sepuluh) indikator

sasaran atau 38,46% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dua (dua) indikator sasaran atau 7,7% pencapaian dengan kriteria **Kurang**. dengan Rata-rata realisasi capaian kinerja 95,46% atau bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 **Baik**.

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap raihan indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

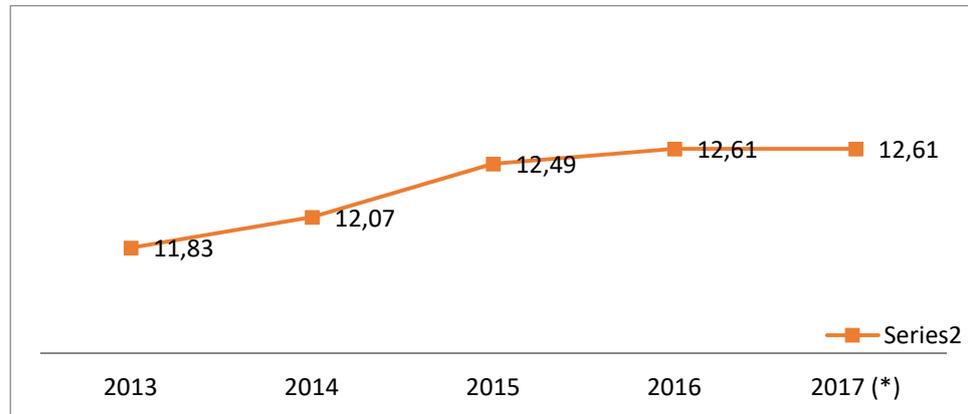
- 3.2.1. Sasaran pertama adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,54	12,61	100,56%	13,20	95,53%
Rata-rata lama sekolah	7,05	7,02	7,05	100,43%	7,20	97,91%

3.2.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2017 atau capaian kinerja 100,56% atau bermakna **Baik Sekali**, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2017 adalah 12,54 tahun dan realisasi capaian 12,61 tahun. Harapan lama sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 adalah sebesar 12,61 tahun. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,61 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Lulus SLTA. Peningkatan Harapan lama sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dari 12,49 tahun pada capaian tahun 2015 meningkat menjadi 12,61 tahun pada tahun 2016 dan 2017.



Gambar Grafik 3.1 Angka Harapan Lama Sekolah

(*) BPS : Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2017 belum dipublikasikan

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 13,20 untuk Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017, dengan demikian indikator angka harapan sekolah telah mencapai 95,53% menuju tahun 2021. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah intervensi program kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Program Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021.

Pada tahun 2017 indikator angka harapan lama sekolah didukung pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan 4 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 5.098.354.000,- dengan fokus kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Non Formal dengan 4 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 625.834.000,- untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada faktor pendukung Pendidikan Non Formal (kesetaraan) Paket A, B dan C serta Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

(Kampung Inggris Kebumen, Kampung Arab dan Kampung Jawa).

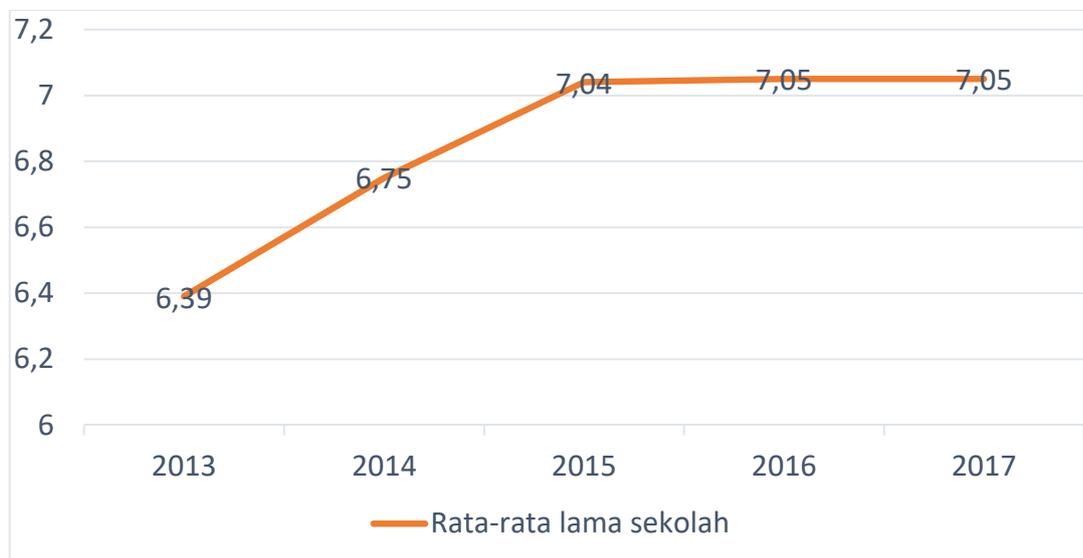
Terhadap hasil pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah terhadap program kegiatan dinilai efektif dan berhasil, dengan demikian diharapkan pada masa mendatang rata-rata penduduk dapat mengenyam pendidikan minimal selama 13,20 tahun atau setara Diploma sesuai target akhir RPJMD 2016-2021.

3.2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah.

Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,43% atau bermakna **Baik Sekali**. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,05 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,02 tahun. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan), Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif (15-55 tahun).

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator angka harapan sekolah telah mencapai 97,91%. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah pada tahun 2017 indikator rata-rata lama sekolah didukung pada Program Pendidikan Non

Formal yang terdiri dari 4 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 625.834.000,- untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada faktor pendukung Pendidikan Non Formal (kesetaraan) Paket A, B dan C serta Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Kampung Inggris Kebumen, Kampung Arab dan Kampung Jawa) dan Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) sebesar 3,2 Milyar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut grafik Realisasi Rata-rata lama sekolah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:



Gambar Grafik 3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Keberhasilan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun sampai dengan 55 tahun tersedia pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C, selain program kegiatan tersebut adanya program Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN yaitu Program Indonesia Pintar dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD

untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Kabupaten Kebumen merupakan stimulan aktif yang mendorong angka bertahan sekolah dan meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat luas. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah layanan pendidikan NonFormal, karena diperlukan koordinasi lebih lanjut lintas sektor di tingkat Kabupaten terhadap target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama untuk penduduk usia 15-55 tahun yang masih banyak tingkat kelulusannya baru di tingkat SMP, SMA/SMK bahkan sebagian baru lulus jenjang SD.

- 3.2.2. Sasaran kedua yaitu meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan dengan indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus ((PROSENTASE APS (Angka Partisipasi Sekolah) + Prosentase Sekolah Terakreditasi A)/2)). Adapun realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Prosentase Sekolah terakreditasi pada tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	Sekolah Terakreditasi
2013	95,79%	14,30%
2014	100,04%	15,38%
2015	100,83%	16,55%
2016	99,59%	19,42%
2017	97,46%	25,52%

Berdasarkan perhitungan rumus indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	59,51%	56,49	61,49	108,85%	63,39	89,11%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan tahun 2017 atau capaian kinerja 108,85% atau dengan kriteria **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 ada peningkatan realisasi Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain adanya anggaran fasilitasi bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp. 260.000.000,- untuk fasilitasi pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar sejumlah 120 sekolah.

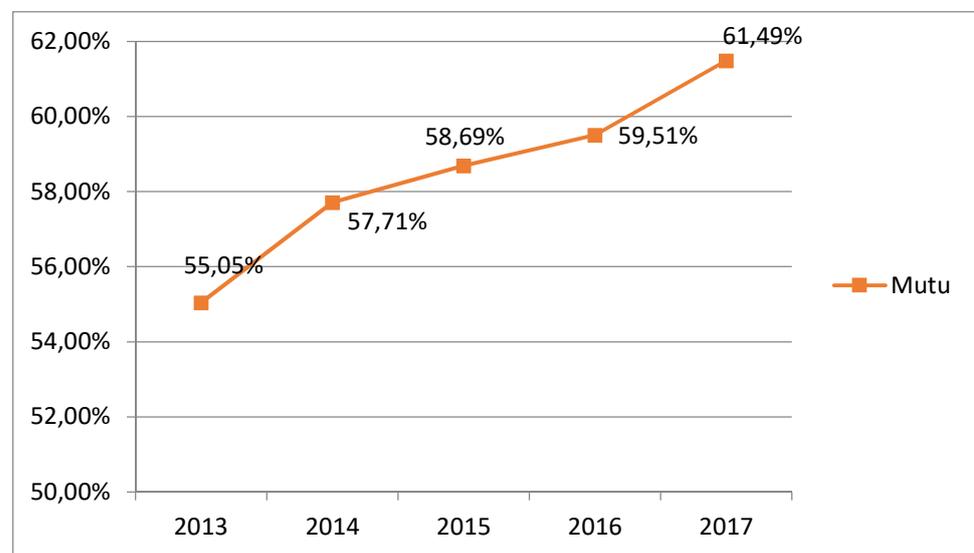
Keberhasilan pencapaian target akses mutu layanan pendidikan juga didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan total anggaran Rp. 5.557.748.000,-.

Pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target Prosentase Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan

tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indicator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan telah mencapai 89,11%. Dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja institusi pemerintahan, diharapkan pada akhir tahun RPJMD dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut grafik Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:



Grafik 3.3 Prosentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

3.2.3. Sasaran ketiga meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olah raga dengan indicator kinerja Capaian prestasi pemuda dan olah raga.

Adapun rumus perhitungannya adalah Capaian Prestasi Cabang Olahraga ditambah Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional dibagi dua.

Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6 Capaian realisasi Capaian prestasi pemuda dan olahraga

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Capaian prestasi pemuda dan olahraga	48,75	46,79	50	101,52%	65,38%	76,47%

Rincian dari Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Cabang olahraga dan Capaian keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional

TAHUN	Capaian Prestasi Cabang Olahraga		Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional	
	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional
2015	14	39	250	6
2016	19	40	350	7
2017	20	40	400	8

Pada indikator sasaran ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 50% dan capaian kinerja 108,85% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 maka kinerja tahun 2017 dapat disimpulkan lebih baik.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga untuk berlatih dan anggaran.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator capaian prestasi pemuda dan olahraga telah mencapai 76,47%. Adapun **solusi** dan upaya untuk mencapai target akhir RPJMD

adalah dengan meningkatkan sarana dan prasana olahraga agar supaya para atlet dapat berlatih dengan maksimal.

3.2.4. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

3.2.4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Berikut table perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

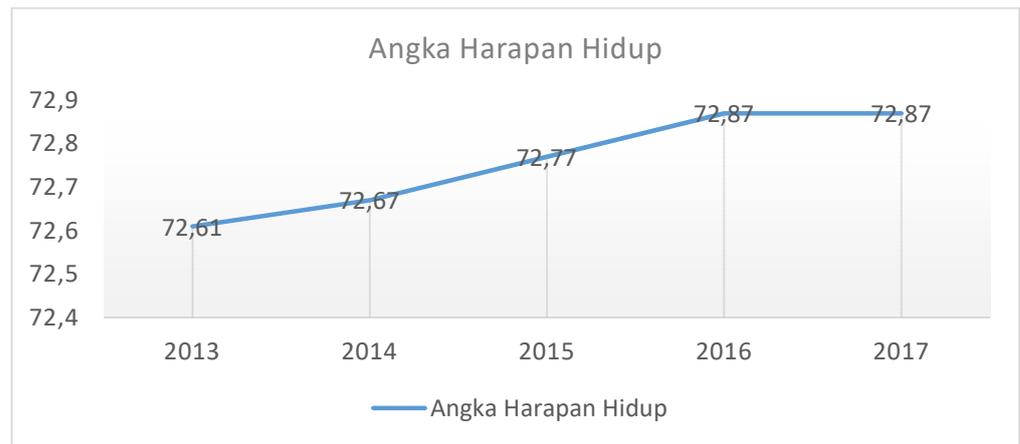
Tabel 3.8 Capaian Angka Harapan Hidup

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Harapan Hidup	72,87	72, 85	72, 87*	100,03%	73,01	99,80%

*Angka sementara dari BPS Kabupaten Kebumen.

Selama periode 2013 hingga 2017, Kabupaten Kebumen telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 2,4 tahun. Pada tahun 2013 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 70,41 tahun dan pada tahun 2017 Angka Harap Hidup 72,87 tahun atau mencapai target kinerja dengan capaian 100,03% dengan kriteria **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 maka capaian kinerja tahun 2017 adalah 99,80 %.

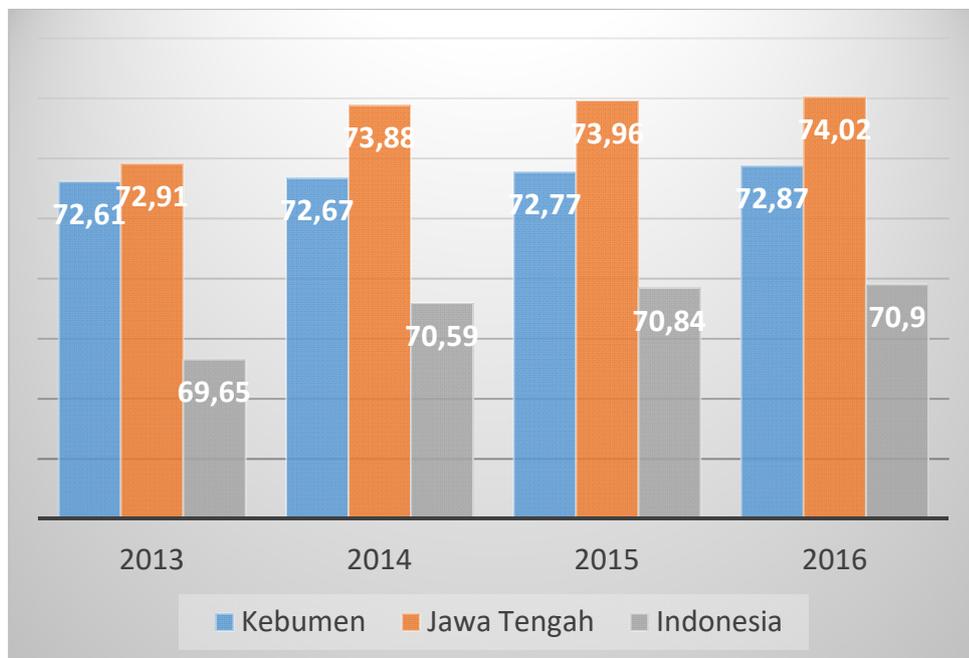
Adapun gambar grafik angka harapan hidup Kabupaten Kebumen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen 2013-2017

Sumber : BPS dan DINKES Kab. Kebumen data diolah

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen periode 2013-2016 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2016, namun lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Indonesia periode 2013-2016. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.5 Perbandingan Angka Harapan Hidup

Secara umum Angka harapan semakin meningkat, indicator ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian indicator lainnya yaitu Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi yang kinerjanya perlu terus ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain dari segi faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi dan faktor budaya. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang, masih adanya kasus penyakit menular dan tidak menular serta masih ditemukannya kasus gizi buruk menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Adanya kematian Ibu dan Kematian bayi juga tidak terlepas dari segi faktor masyarakat itu sendiri maupun dari segi pelayanan. Derajat kesehatan manusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, perilaku penduduk terhadap kesehatan misalkan ada 3 T faktor yang sangat berpengaruh pada derajat kesehatan yaitu (3 T = Tiga Terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk termasuk terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat sampe di fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat dan terlambat mendapat pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat rujukan, meningkatkan peran lintas sektor, organisasi profesi, serta peran masyarakat sehingga kualitas hidup lebih sejahtera dan produktif.

Pada tahun 2017 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh 12 kegiatan dengan anggaran Rp 33.869.653.000,- dengan realisasi Rp 28.175.652.331,- (83,18 %). Penyerapan anggaran

tidak 100 5 dikarenakan adanya efisiensi dalam belanja karena penyesuaian harga dilapangan.

3.2.4.2. Angka Kematian Ibu

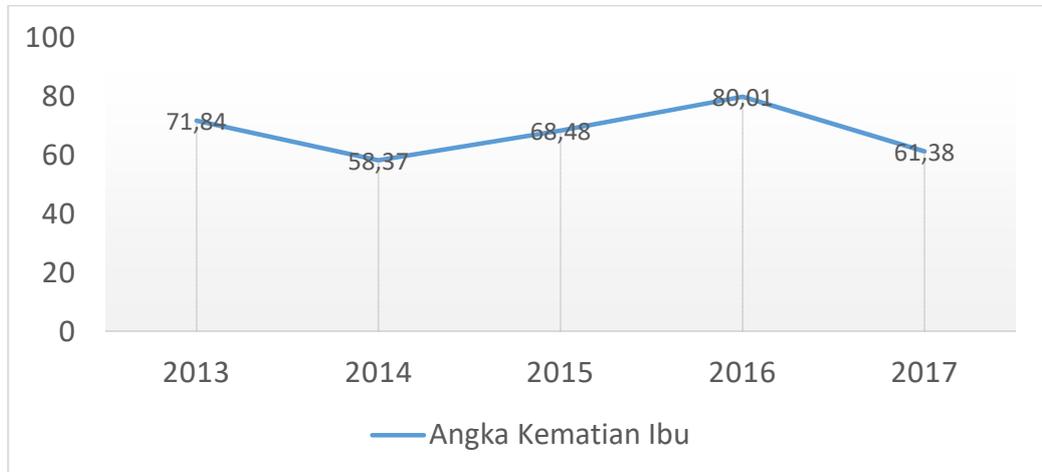
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup. Berikut tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

Tabel 3.9 Capaian Angka Kematian Ibu

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Ibu	80,01/	95/ 100.000 KH	61,38/ 100.000 KH	135,39%	68	110,78%

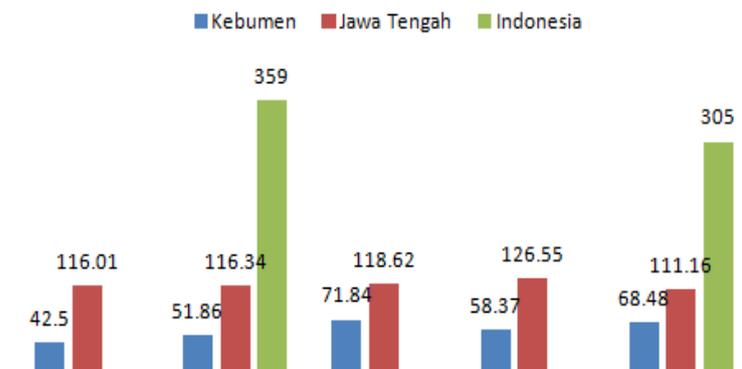
Capaian kinerja angka kematian Ibu pada tahun 2017 mencapai 135,39% atau kriteria **Sangat Baik** dan realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2017 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Adapun dari 12 jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, sebagian meninggal dalam keadaan hamil yaitu 6 kasus karena adanya penyakit hipertensi dalam kehamilan, 2 kasus karena perdarahan, masing-masing 1 kasus dengan total 4 kasus karena penyakit penyerta yang dialami ibu selama kehamilan maupun nifas antara lain 1 kasus karena penyakit DM, 1 kasus karena gagal nafas, 1 kasus karena kanker servik dan 1 kasus karena tumor paru.

Berikut adalah realisasi Angka Kematian Ibu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:



Gambar Grafik 3.6 Angka Kematian Ibu 2013-2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kebumen

Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen periode 2011-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015 dan lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Indonesia pada tahun 2012 dan 2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.7 Perbandingan Angka Kematian Ibu 2012-2015

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun hambatan atau tantangan

dalam pencapaian target antara lain : masih banyaknya ibu hamil dengan faktor resiko yang menyertai misalkan ibu hamil dengan mengidap penyakit, akses dalam rujukan masih ada yang sulit di jangkau, kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan difasilitas Kesehatan masih kurang.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu agar mencapai target akhir RPJMD adalah: meningkatkan jejaring rujukan mulai tingkat dasar, pelayanan 24 jam Puskesmas Mampu Persalinan, pendampingan serta pemantauan oleh tenaga kesehatan serta perlunya dukungan serta peningkatan kerjasama antar berbagai sektor.

Pada tahun 2017 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh 7 Kegiatan dengan anggaran Rp 35.577.013.000 dengan realisasi Rp 26.954.157.528,- (76,6 %).

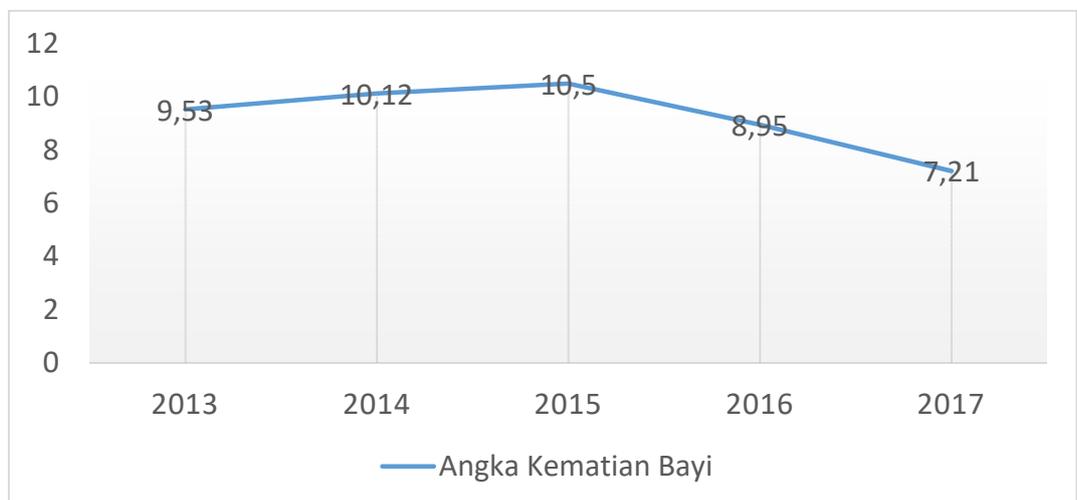
3.2.4.3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Selama periode 2013 hingga 2017 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan dan penurunan Angka Kematian Bayi, namun demikian pada tahun 2017 Kabupaten Kebumen berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Angka Kematian Bayi tahun 2017 ditargetkan 11/1000 KH, terealisasi 7,21/1000 KH atau pencapaian kinerja sebesar 134,45% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Berikut tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan % capaian terhadap target akhir RPJMD:

Tabel 3.10 Perbandingan Angka Kematian Bayi

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaianrhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian Bayi	8,95/ 1000 KH	11/ 1000 KH	7,21/ 1000 KH	134,45%	10,50	145,63%

Pada tahun 2017 Angka kematian bayi sebagian besar meninggal pada saat usia 0-6 hari sebanyak 73 bayi hal ini antara lain karena BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 33 bayi, asfeksia sebanyak 20 bayi dan kelainan congenetal/bawaan sebanyak 20 bayi. Yang kedua saat kematian pada usia 29 hari-11 bulan sebanyak 49 bayi dan yang ketiga kematian terjadi usia 7-28 hari sebanyak 19 bayi. Berikut adalah realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

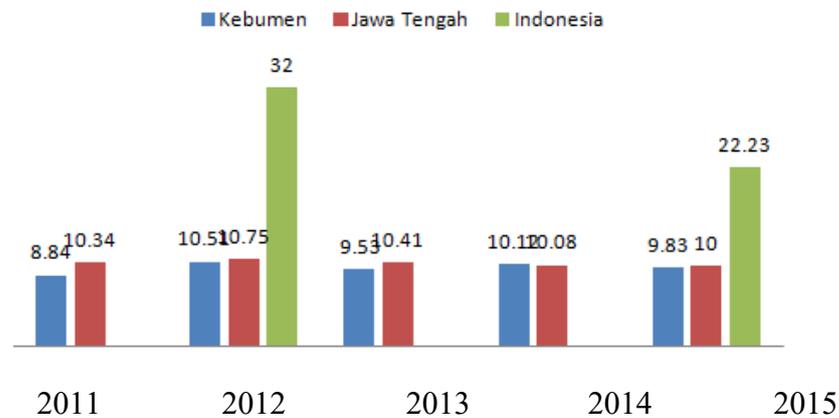


Gambar Grafik 3.8 Angka Kematian Bayi 2013-2017

Sumber : Dinas Kesehatan 2017 data diolah

Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen periode 2011-2015 lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015 dan lebih rendah

dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Indonesia pada tahun 2012 dan 2015. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Grafik 3.9 Perbandingan Angka Kematian Bayi

Keberhasilan percepatan penurunan kematian Bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal peran sertaterutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun hambatan atau tantangan dalam pencapaian target hampir sama dengan tantangan pada kematian Ibu karena kualitas bayi didapat dari kesehatan pada ibu semasa kehamilan dan proses kelahiran, disamping juga masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya ASI Eksklusif yang mana hal ini bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja Angka Kematian Bayi agar tetap mencapai target akhir RPJMD 2021 adalah meningkatkan kualitas pelayanan obstetri dan neonatal sampai dengan tingkat pelayanan dasar (kunjungan dokter obgyn dan anak terjadwal), adanya Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, meningkatkan kualitas SDDTK pada bayi dan balita.

Anggaran yang digunakan untuk menekan Angka Kematian Bayi sama dengan anggaran untuk menekan angka Kematian Ibu yaitu ada 7 kegiatan dengan anggaran Rp 35.577.013.000 dengan realisasi Rp 26.954.157.528,- (76,6 %).

3.2.5. Sasaran kelima yaitu Terwujudnya Masyarakat yang agamis dan berahlak mulia dengan indikator sasaran :

3.2.5.1. Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah

Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah (JSL) dikalikan seratus persen.

Adapun Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an tingkat SD dan SMP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an

Tingkat Pendidikan	2015		2016		2017	
	JSLB-AI	JSL	JSLB-AI	JSL	JSLB-AI	JSL
SD	21.837	21.837	21.639	21.639	20.984	20.984
SMP	21.899	21.899	21.248	21.248	20.687	20.687
Jumlah	43.736	43.736	42.887	42.887	41.671	41.671



Berdasarkan data tersebut di atas Realisasi dan capaian kinerja Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah	100 %	100%	100%	100%	100%	40%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

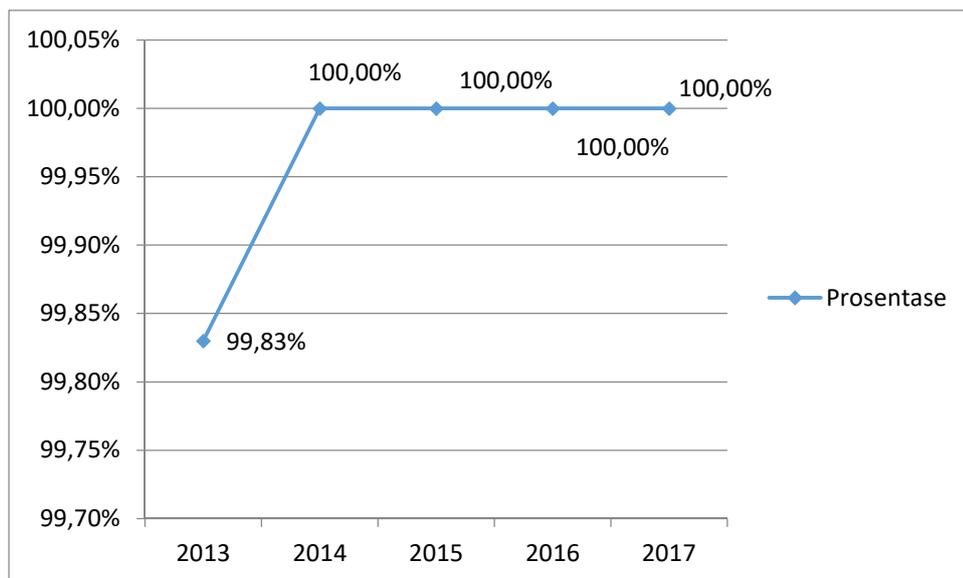
Capaian angka Melek Huruf Al-Quran siswa lulus sekolah semakin meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah untuk Sekolah/Madrasah jenjang SD sederajat dan Ujian Nasional untuk Sekolah/Madrasah jenjang SMP-SMA/SMK sederajat berjalan dengan baik.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indicator Prosentase Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah telah mencapai 40%. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah dengan tetap menjaga kinerja pada program dan kegiatan sesuai dengan yang sudah

ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.

Pada tahun 2017 indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah didukung oleh Program wajib belajar sembilan tahun dengan kegiatan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB sebesar Rp. 727.168.000,-.

Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berikut ini adalah gambar grafik peningkatan realisasi capaian indikator Angka Melek Huruf Al-Quran.



Gambar Grafik 3.10 Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah Tahun 2013 - 2017

Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

3.2.5.2. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus perhitungan Capaian Penurunan (Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun $n+1$ Penemuan Kasus Baru HIV tahun $n+1$ + Kasus Pertikaian Agama tahun n).

Berikut rincian dari masing-masing indikator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan:

Tabel 3.13 Rincian indikator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Tahun	Rehabilitasi Kasus Narkoba ¹⁾	Penemuan Kasus Baru HIV ²⁾	Kasus Pertikaian Agama ³⁾
2015	13	107	0
2016	15	178	0
2017	6	267	0

Sumber : ¹⁾. Kantor Kesbangpol, ²⁾. Dinas Kesehatan dan Bagian Kesra, ³⁾. Bagian Kesra

Berdasarkan rincian dari masing-masing sub indikator tersebut di atas dapat disimpulkan capaian Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	29 %	27,56%	31,44%	114,08%	37,65%	83,5%

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa semakin banyak kasus yang ditangani maka semakin bagus kinerjanya.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan tahun 2017 lebih baik dan melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 114,08 % atau masuk pada kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif adalah:

1. Pembentukan dan Pelatihan Warga Peduli AIDS
2. Sosialisasi HIV-AIDS ditingkat sekolah dan Organisasi Masyarakat
3. Sosialisasi HIV-AIDS dilingkungan kerja (Perusahaan)
4. Bantuan Nutrisi bagi ODHA (orang dengan HIV-AIDS)
5. Penambahan layanan test HIV (Klinik VCT)
6. Kampanye Pencegahan HIV-AIDS
7. Sosialisasi HIV-AIDS disektor Wisata
8. Pemeriksaan HIV dan IMS kepada Populasi kunci
9. Pemeriksaan HIV kepada Masyarakat
10. Pembentukan kelompok Kerja Pencegahan HIV-AIDS
11. Sosialisasi pada Ulama Umaro
12. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi daerah dalam Penanggulangan AIDS tahun 2016-2020.
13. Penyebaran informasi HIV-AIDS melalui media Massa
14. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV-AIDS melalui Pembentukan Warga Peduli AIDS. WPA yang sudah

terbentuk yaitu 310 Desa dari target sejumlah 460 Desa/Kelurahan.

15. Inovasi Program Nikah Yes HIV-AIDS yaitu program konseling HIV-AIDS kepada para calon pengantin.

Sedangkan hambatan dalam mencapai realisasi kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan adalah sebagai berikut:

1. Belum semua anggota KPA Kabupaten Kebumen aktif dalam Penanggulangan HIV-AIDS
2. Adanya perubahan perilaku di masyarakat dan remaja kearah perilaku yang beresiko tertular HIV-AIDS.
3. Populasi kunci masih berperilaku beresiko tertular HIV-AIDS
4. Sulitnya merubah perilaku menyimpang pada ODHA dan banyaknya ODHA yang mangkir pengobatan.
5. Belum seluruh masyarakat paham tentang HIV-AIDS secara komprehensif.
6. Kesadaran masyarakat untuk test HIV masih rendah.
7. Berakhirnya dukungan dari Donor sehingga Program Penanggulangan HIV-AIDS kurang maksimal.

Solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di akan datang:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas tenaga medis dalam pelayanan kepada ODHA
3. Organisasi perangkat Daerah anggota KPA untuk dapat berperan aktif sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan HIV-AIDS.
4. Menjamin keberlangsungan program dengan dukungan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota.
5. Menegakan Peraturan daerah dalam Penanggulangan HIV-AIDS

- 3.2.6. Sasaran keenam yaitu Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum, dengan indikator sasaran kasus pelanggaran hokum yang ditangani.

Indikator Kasus pelanggaran hokum diperoleh dari jumlah laporan masyarkat dan temuan petugas dalam menegakkan perda/ perkada yang telah dilakukan pembinaan . Adapun capaian kinerja kasus pelanggaran hokum tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kasus Pelanggaran Hukum

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Kasus Pelanggaran Hukum	800 kasus	750	750	100,00%	500	66,67%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Rincian capaian penegakan perda dan perkada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Perda-perda yang ditegakkan

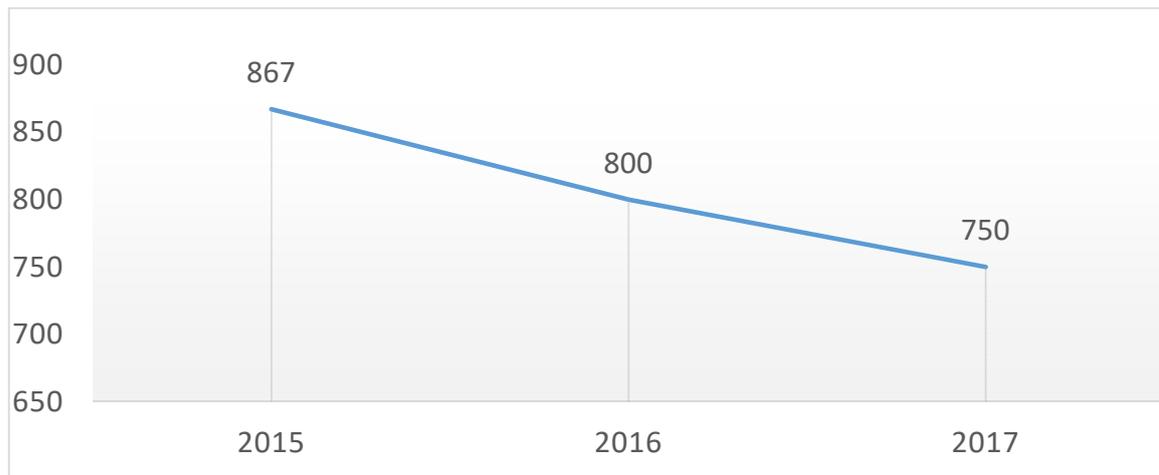
NO	Perda-Perda yang Ditegakkan	Yang Dilaporkan dan atau Dipantau	Yang Diselesaikan		
			Pembinaan	Teguran	Proses Hukum
1	2	3	4	5	6
1	Perda Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan.	10	10		
2	Perda Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.				
3	Perda Nomor 19 Tahun 1993 tentang K-3.	90	90	4	14
4	Perda Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataaan.	4	4		
5	Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO).	138	138		
6	Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.	332	332	32	5
7	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang	6	6	3	



1	2	3	4	5	6
	Pengendalian Pengawasan Minuman Keras.				
8	Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	34	34	16	
9	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.	9	9		
10	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.	5	5	2	
11	Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.	49	49	14	
12	Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.				
13	Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang.				
14	Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Industri.				
15	Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Perusahaan.				
16	Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	3	3		
17	Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Restribusi Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobatan Tradisional.	22	22		
18	Perda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekom.	9	9		
19	Penertiban rokok dengan cukai palsu/tanpa cukai	34	34		
20	Terkait dengan Penertiban Anak Sekolah.	5	5		
	J U M L A H	750	750	71	19

Realisasi pada tahun 2017 apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator penurunan kasus pelanggaran hukum baru mencapai 66,67%, solusi atau upaya untuk mencapai target adalah dengan melakukan secara intensif dalam Penegakan Perda dan Pembinaan Trantibum.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kasus pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah pada wilayah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya kasus pelanggaran hokum dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Gambar Grafik 3.11 Kasus Pelanggaran Hukum 2015-2017

Faktor keberhasilan yang mendorong penurunan kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah antara lain :

1. Bertambahnya tenaga pengendalian keamanan dan keyamanan lingkungan
2. Meningkatkan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan formasi dalam bernegosiasi dan menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Melakukan sosialisai perda dan penindakan terhadap pelanggar perda untuk meminimalisir munculnya kasus
4. Melakukan koordinasi dengan pelaksana ketentraman dan ketertiban pada tingkat kecamatan
5. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan lintas instansi
6. Melakukan rutinitas patroli wilayah guna meminimalisir pelanggaran kasus
7. Melakukan penambahan intensitas pembinaan , penertiban dan penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah sampai dengan pro yustisi

Penurunan kasus pelanggaran peraturan daerah selaras dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan juga peningkatan kemampuan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dilaksanakan dengan patroli wilayah, pembinaan dan pelatihan anggota satlinmas .
2. Program pemeliharaan keamanan , ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dengan melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dengan pembentukan Kader Siaga Trantib (KST). Kader Siaga Trantib (KST) merupakan melibatkan peran serta partisipasi aktif masyarakat dalam wadah kader siaga ketentraman dan ketertiban guna mewujudkan situasi dan kondisi Kabupaten Kebumen yang aman , tertib dan kondusif dengan sinergitas inovasi kader siaga dalam mendukung pelayanan publik

Dalam mencapai indikator sasaran tersebut, pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana dari APBD dengan target anggaran (gabungan /penjumlahan anggaran semua kegiatan yang mendukung Indikator sasaran tersebut) Rp 1.054.709.000 dan mencapai realisasi anggaran sebesar Rp1.049.804.128 atau 99,53 %.

3.2.7. Sasaran ketujuh yaitu Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, dengan 4 (empat) indicator sasaran dengan perincian sebagai berikut:

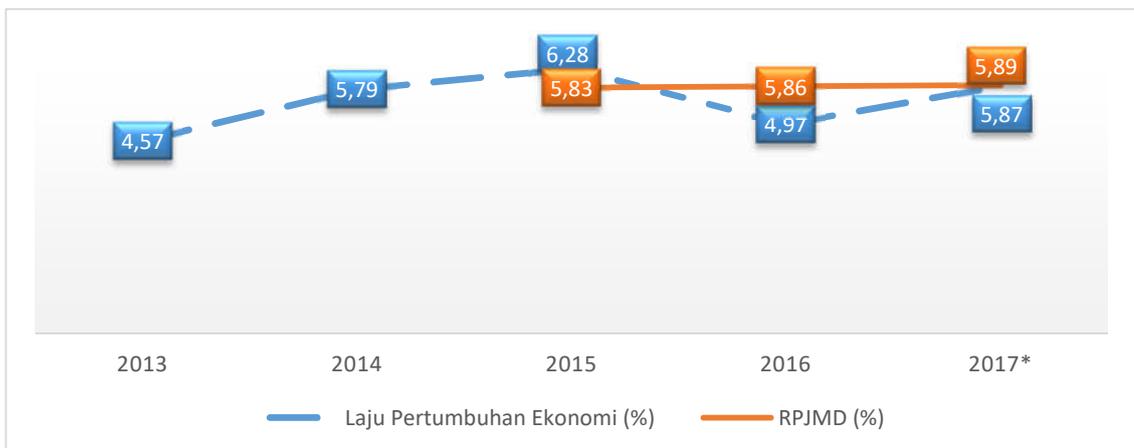
3.2.7.1. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator ini ditargetkan sebesar 5,89% pada akhir Tahun 2017, dengan realisasi kinerja sebesar 5,87% sehingga capaian 99,66% atau kriteria capaian **Baik**. Realisasi dan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.17 Capaian Pertumbuhan ekonomi

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Pertumbuhan ekonomi	4,97%	5,89 %	5,87 %	99,66%	6,00 %	97,83%

Tidak tercapainya target disebabkan perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2017 mencapai 5,87%, tahun 2016 mencapai 4,97%, tahun 2015 mencapai 6,28%, tahun 2014 mencapai 5,79%, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,57%.



Gambar Grafik 3.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017 dan Pencapaian Target RPJMD

Sumber : BPS, 2017 Keterangan : *) Angka sementara

3.2.7.2. Pendapatan perkapita penduduk

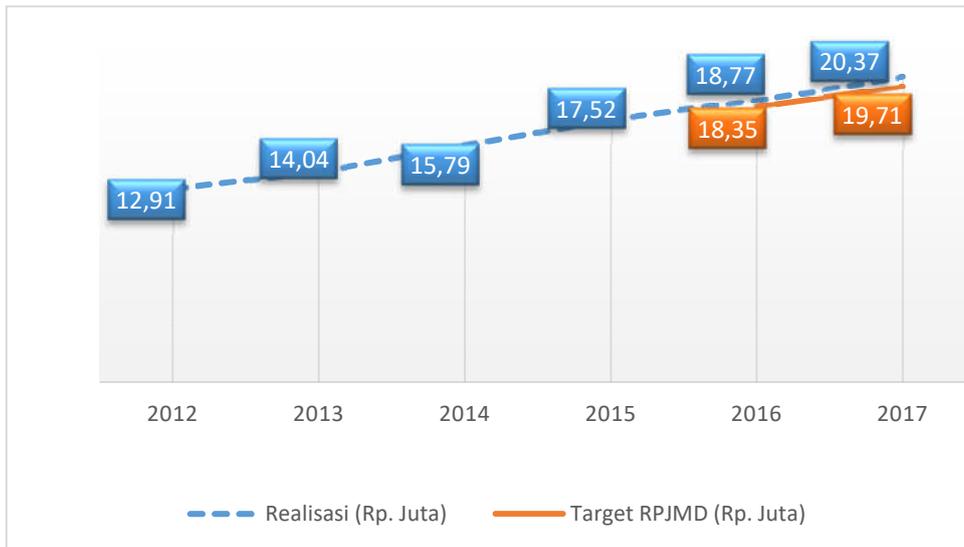
Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Realisasi dan capaian kinerja Pendapatan perkapita penduduk dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Pendapatan perkapita penduduk

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
PDRB Per Kapita	18,77 juta	19,71 juta	20,37 juta	103,32%	25,18 juta	70,32%

Capaian kinerja indicator pendapatan perkapita penduduk telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 103,32% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Adapun pendapatan perkapita penduduk sebagai berikut: PDRB per kapita Kebumen pada tahun 2017 mencapai 20,37 juta rupiah, tahun 2016 mencapai 18,77 juta rupiah, tahun 2015 mencapai 17,52 juta rupiah, tahun 2014 mencapai 15,79 juta rupiah dengan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 8,52%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 7,13%. Indikator ini tahun 2017 ditargetkan sebesar 19,71 juta rupiah dengan realisasi sebesar 20,37 juta rupiah dan capaian sudah dapat mencapai 103,35%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar Grafik 3.13 Perkembangan PDRB PerKapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

Sumber : BPS, 2017

Penetapan target pendapatan perkapita penduduk 2017 dalam RPJMD menggunakan tahun dasar 2015 yang juga memenuhi segala asumsi. Asumsi yang digunakan adalah asumsi optimisme mengikuti tren kenaikan PDRB perkapita termasuk asumsi jumlah penduduk sehingga realisasi tidak tercapai.

3.2.7.3. Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1

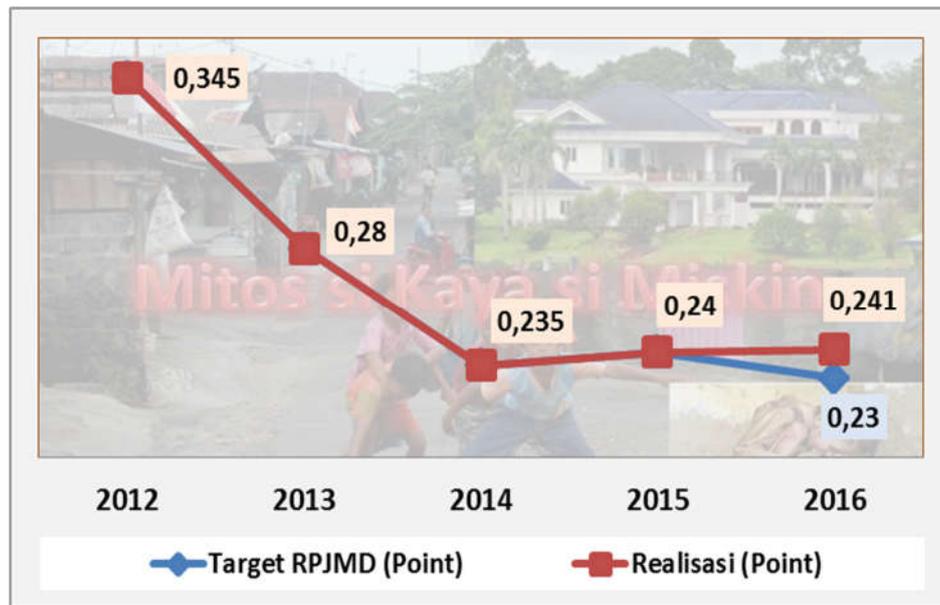
menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Rasio/Indeks Gini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.19 Capaian Rasio/ Indeks Gini

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Rasio/ Indeks Gini	0,24	0,23	0,23	100,00%	0,21	90,48%

Capaian kinerja indicator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**.

Angka indeks Gini selama periode 2012-2016, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama 3 (tiga) tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian. Berikut gambar grafi rasio gini 2012-2016:



Gambar Grafik 3.14 Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2016

Ketimpangan cenderung turun tetapi mengalami peningkatan pada tahun terakhir, walaupun masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kenaikan ini dapat diantisipasi melalui program/kegiatan yang lebih berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah (*pro poor*).

3.2.7.4. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

Rumus pencapaian Indikator Sasaran ini adalah Jumlah Kawasan Industri yang terbangun + Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terbentuk:

Tabel 3.20 Capaian Indikator kinerja Pembentukan kawasan perdesaan

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	5	2 Unit	2Unit	100%	6 Unit	83,33%



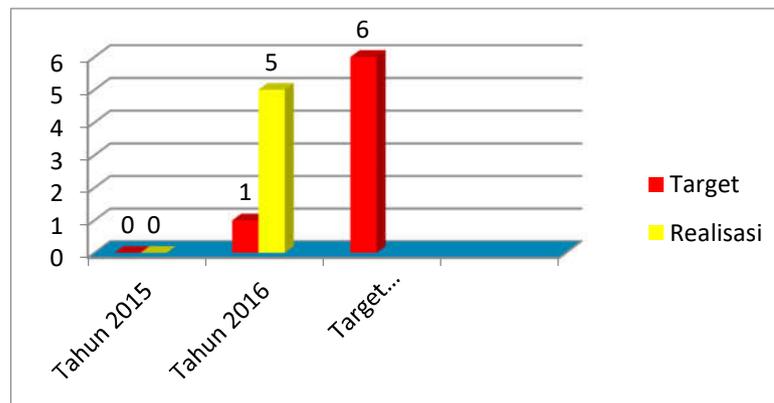
Target dari Indikator Terbangunnya kawasan industry merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2016 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan sehingga realisasi kinerja pada tahun 2017 diakui 2 unit, sehingga capaian Kinerja 100% atau kriteria Capaian **Baik**. Kawasan pedesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan).

Adapun tujuan pembentukan kawasan pedesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan dan pada tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada kawasan pedesaan dengan Bantuan Permodalan BUMDes dari dana APBN sebanyak Rp 100.000.000.- untuk desa kawasan anyaman pandan (Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganya, dan desa kawasan batik (Desa Gemeksekti dan Desa Jemur Kecamatan Kebumen). Dari APBD Provinsi sebesar Rp.50.000.000,- yang dialokasikan untuk menunjang kawasan kampung peternakan sapi di Desa Tanggulanin Kecamatan Klirong.

Pada tahun 2017 kawasan perindustrian belum terbangun, usaha dan upaya untuk mewujudkan kawasan perindustrian telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri;
2. Penyusunan Masterplan Kawasan Industri;
3. Identifikasi dan Penetapan Status Lahan milik Pemerintah Daerah seluas 115 Ha;

Tantangan yang dihadapi untuk tetap menjaga eksistensi kawasan perdesaan adalah budaya masyarakat terhadap system ijon. Adapun **solusi** yang dapat dilaksanakan adalah mengoptimalkan pengelolaan BUMDes sehingga tidak hanya penyalur atau penjual produk dari kawasan perdesaan akan tetapi juga sebagai tempat simpan pinjam bagi pengrajin dari kawasan perdesaan.

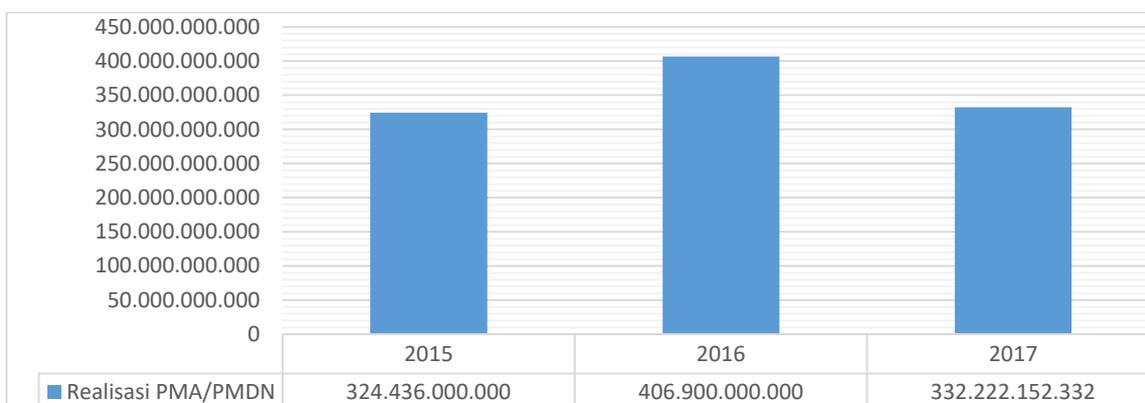


Gambar Grafik 3.14 Pembentukan Kawasan Perdesaan

- 3.2.8. Sasaran kedelapan yaitu Meningkatnya daya saing investasi daerah.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN diukur dengan membandingkan Nilai atau Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n - Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n -1) dengan Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n -1 dikalikan 100%.

Berikut grafik data realisasi investasi PMA/ PMDN dalam rupiah tahun 2015-2017:



Gambar Grafik 3.15 Realisasi Investasi PMA/ PMDN 2015-2017

Sumber: DPMPTSP 2017

Berdasarkan data realisasi investasi PMA/ PMDN di atas dapat diketahui realisasi dan capaian kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	20,26%	5%	-18,35%	-3,67%	6%	0,006%

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa seharusnya target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah naik sebesar 5% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp. 406.900.000.000,-. Namun dari table diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2017 hanya mencapai Rp. 332.222.152.332,- atau dengan kata lain memperlihatkan kenaikan -18,35% atau capaian kinerja -3,67 % dengan kriteria capaian kinerja **Kurang**, sehingga harapan untuk mencapai

target sebesar Rp. 423.121.800,- tidak tercapai, hal ini disebabkan karena :

1. Rendahnya minat investor PMA/PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen.
2. Tidak adanya standarisasi jenis perizinan, lambatnya proses perizinan, rendahnya kompetensi aparatur daerah yang melayani perizinan dan seringnya mutasi aparatur atau pejabat di daerah.
3. Masih sedikitnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi.
4. Belum terselenggaranya forum kerjasama investasi.

Adapun upaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kebumen adalah :

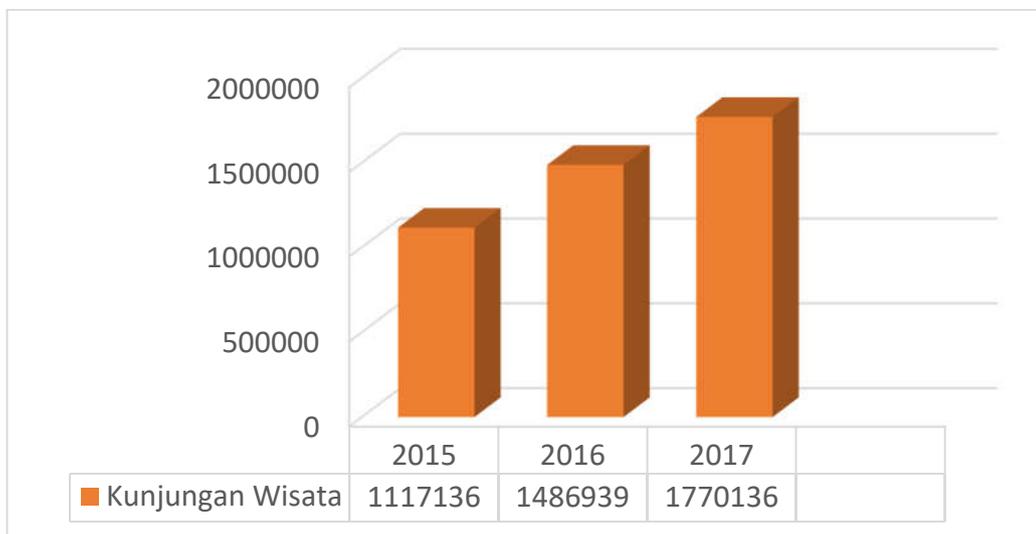
1. Percepatan pelayanan perizinan dalam bentuk layanan dalam bentuk layanan perizinan 3 jam
2. Perbaikan dibidang regulasi dalam bentuk Raperda tentang insentive dan kemudahan investasi
3. Standarisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal di daerah
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.

Pada tahun 2017 indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN didukung oleh Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan Anggaran Rp. 632.515.000,- dengan Realisasi Rp. 617.124.165,- atau realisasi anggaran sebesar 98%.

3.2.9. Sasaran Kesembilan yaitu Meningkatnya kunjungan wisatawan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata

Adapun rumus perhitungannya Persentase peningkatan kunjungan wisata adalah Jumlah kunjungan Wisatawan tahun n - Jumlah kunjungan wisatawan tahun $(n-1)$ dibagi Jumlah kunjungan tahun $(n-1)$.

Berikut grafik kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017:



Gambar Grafik 3.16 Kunjungan Wisata

Berdasarkan data realisasi kunjungan wisata diatas capaian kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisata Tahun 2017

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase peningkatan kunjungan wisata	33,10%	17,01%	19,05%	111,99%	19,69%	96,74%



Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Presentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 119,99% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Pada tahun 2015 data kunjungan yang dihitung hanya dari kunjungan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2016 dan tahun 2017 data kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah daerah. Karena Pemerintah Daerah mulai tahun 2016 telah melakukan intervensi ke pengelola obyek wisata diluar yang dikelola Obyek wisata Pemerintah Daerah. Sehingga antara tahun 2015 ke Tahun 2016 terjadi lonjakan peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun antara tahun 2016 ke Tahun 2017 terjadi penurunan capaian dengan sebelumnya, namun jumlah Pengunjung meningkat fluktuatif Pertahunnya.

Berikut rincian dari jumlah kunjungan wisata milik pemerintah daerah dan non pemerintah daerah:

Tabel 3.23 Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Dan Non Pemerintah Daerah Realisasi Pengunjung Tahun 2013 - 2017

NO	OBYEK WISATA	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
	MILIK PEMDA			
1	GOA JATIJJAR	322.936	355.865	395.630
2	PANTAI LOGENDING	125.310	144.532	136.284
3	GOA PETRUK	9.876	7.834	7.803
4	PANTAI KARANGBOLONG	26.884	27.290	27.744
5	PANTAI PETANAHAN	90.668	106.825	166.201
6	WADUK SEMPOR	34.951	39.865	47.948
7	PAP. K R A K A L	24.822	25.497	28.168
8	WADUK WADASLINTANG	27.056	26.754	31.766
9	PANTAI SUWUK	454.633	362.190	246.100
	NON PEMDA			
10	BALAI INFORMASI DAN KONSERVASI KEBUMIHAN	0	12.784	13.692
11	BENTENG VAN DER WIJCK	0	65.205	54.301
12	WISATA ALAM JEMBANGAN	0	31.106	32.422
13	P. MENGANTI	0	227.530	448.667
14	GUNUNG HUD	0	10.013	42.544
15	PENTULU INDAH	0	30.106	37.380
16	ALIAN BUTTERFLY PARK	0	13.543	6.468
17	SAWANGAN ADVENTURE	0	0	23.494
18	PANTAI PEDALEN	0	0	11.832
19	PANTAI SAWANGAN	0	0	5.057
20	PANTAI PECARON	0	0	6.635
	JUMLAH	1.117.136	1.486.939	1.770.136

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kebumen 2017.

Usaha yang telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata pada tahun 2017 diantaranya Pembinaan kepada Desa Wisata, Pembinaan kepada kelompok sadar wisata, pembinaan kepada pelaku wisata, studi komparasi, dan pembinaan kepada pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Event-event yang mendatangkan potensi wisatawan domestik dan mancanegara juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya Inbok Carnival, Jelajah Wisata Offroad 4 X 4, Adventure Trail / Trabas, Festival Band Pelajar, Lomba Fotografi, Lomba Mancing, Lomba Dayung, Pembuatan Film Pariwisata, Kebumen Karnival.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Presentase peningkatan kunjungan wisata telah mencapai

96,74%. **Solusi** atau upaya untuk mencapai target adalah dengan bersinergi dengan masyarakat dalam membangun usaha jasa pariwisata. Agar *length of stay* wisatawan meningkat di Kabupaten Kebumen.

Program pendukung untuk mencapai indikator Prosentase peningkatan kunjungan wisata antara lain Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan destinasi pariwisata, Program pengembangan Kemitraan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan jumlah total anggaran Rp. 17.990.306.000,00 dengan total realisasi anggaran Rp. 15.092.740.130,00 atau 83,89%.

- 3.2.10. Sasaran Kesepuluh yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) + (Jaringan rumah tangga berlistrik) dibagi 4 dengan pencapaian indikator. Adapun realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	74,54 %	54,83%	55,77%	101,71%	62,88%	88,69%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian presentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sebesar 101,71% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Rincian realisasi masing-masing dari sub indikator adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi yang baik

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang baru adalah 960,36 kilometer sedangkan jalan dalam kondisi baik tahun 2017 adalah sebesar 508,72 kilometer atau capaian sebesar **52,97 %**.

Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih rendah disebabkan karena Salah satunya banyaknya proyek nasional di kebumen antara lain JJLS, Rel ganda & sebagian dana di Th.2017 digunakan untuk membuka jalan baru di lingkaran utara. Berikut table ketersediaan jalan sesuai kondisi:

Tabel 3.25 Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (dalam kilometer)

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2011-2016	REALISASI KINERJA TH 2012	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016	REALISASI KINERJA TH 2017
KONDISI JALAN							
a. BAIK	458,64	454,685	473,03	494,44	447,82	590,56	508,72
b. SEDANG	-	91,944	132,92	140,22	199,61	89,72	177,45
c. RUSAK RINGAN	-	58,641	182,63	156,96	150,21	126,57	121,13
d. RUSAK BERAT	-	9,930	169,50	166,95	176,69	168,31	153,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 2017

Sedangkan Ketersediaan jalan sesuai status dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.26 Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (Dalam Kilometer)

INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TH 2012	REALISASI KINERJA TH 2013	REALISASI KINERJA TH 2014	REALISASI KINERJA TH 2015	REALISASI KINERJA TH 2016	REALISASI KINERJA TH 2017
STATUS JALAN						
a. Jalan Nasional	60,581	60,582	60,582	56,428	62,890	62,890
b. Jalan Provinsi	30,090	30,090	30,090	30,090	29,670	29,670
c. Jalan Kabupaten	615,200	615,200	615,200	975,150	975,150	960,360
d. Jalan Desa	Na	1.592,080	1.592,080	1.254,01	1.254,01	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan

b. Ketersediaan jaringan Irigasi

Pada Tahun Tahun 2017 jumlah luasan jaringan dalam kondisi baik sebesar 7.717 Ha, Sedangkan Total luasan jaringan irigasi sebesar 12.458 Ha, atau capaian kinerja sebesar **61,94%**.

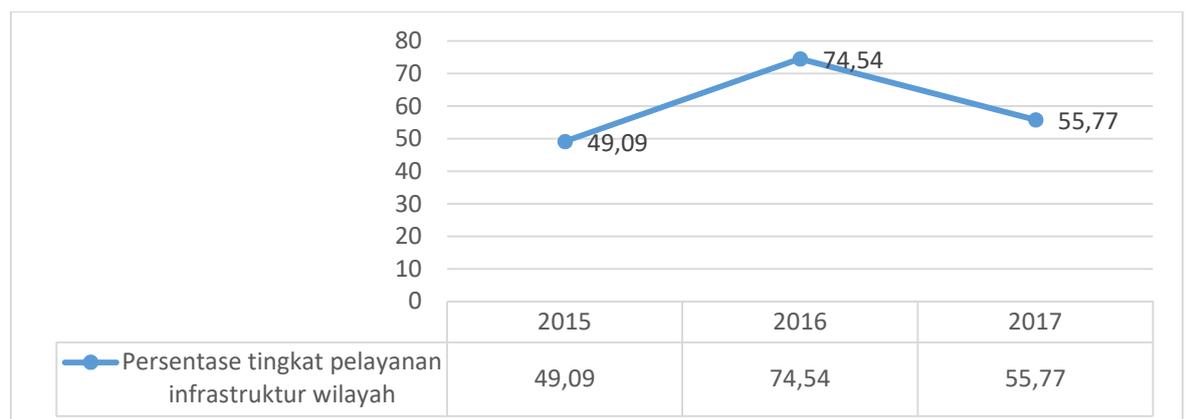
Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor Salah satunya dikarenakan ada penambahan ruas/lokasi baru DI setiap tahunnya

c. Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 1.070.846 Ribu jiwa dengan jumlah seluruh rumah tangga 1.228.544 ribu jiwa rumah tangga atau capaian kinerja sebesar **87,16%**. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik APBD maupun DAK Indikator lainnya adalah ditemukannya varian sumber air baru baik dari mata air maupun sumber lainnya.

Cakupan Jaringan Listrik rumah Tangga indikator cakupan ini di pengaruhi oleh jumlah rumah tangga ada 218,938 rumah tangga dan jumlah seluruh rumah tangga

berlistrik ada 9,151 rumah tangga, atau capaian kinerja mencapai **24%**. keberhasilan indikator ini didukung oleh kesadaran masyarakat atas pentingnya sumber energi listrik untuk kehidupan sehari – hari telah mendorong masyarakat memasang meteran listrik serta adanya kemudahan pengrusan dan pemasangan meteran listrik rumah tangga. Pembangunan jaringan listrik baru ke daerah pegunungan sampai ke pelosok wilayah terpencil mendorong animo masyarakat untuk memasang listrik.

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar Grafik 3.17 Grafik Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Capaian Realisasi tahun 2017 apabila dibaningkan target akhir RPJMD tahun 2021 telah mencapai 88,69%. Hambatan dalam mencapai target tahun 2017 antara lain:

1. Proses pengambilan termin oleh pihak penyedia jasa tidak dilakukan segera setelah pekerjaan fisik selesai, namun pengambilannya diakhir tahun anggaran, sehingga pengambilan termin menumpuk pada akhir tahun dan membuat realisasi fisik dan keuangan tidak seimbang



2. Beberapa kondisi dilapangan tidak bisa diprediksi seperti faktor cuaca dan bencana alam, sehingga dapat menghambat waktu pelaksanaan pekerjaan dan bisa membuat pekerjaan tidak dapat selesai sesuai jadwal.

Solusi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu :

1. Menyarankan kepada penyedia jasa agar segera mengajukan termin sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga anggaran bisa segera terserap sesuai jadwal anggaran kas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memberikan diklat tekhnis, sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang ada.

Program pendukung untuk mencapai Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah antara lain Program Pembangunan jalan (BANPROP), Peningkatan jalan, Pengembangan/perluasan jaringan listrik perdesaan (BANPROP), Rehabilitasi /pemeliharaan jalan DAK, Pengembangan sistem distribusi air minum, Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (kuota kecamatan), Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (kuota kecamatan, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Secara keseluruhan Anggaran yang mendukung pelayanan infrastruktur wilayah adalah sebesar Rp.199.225.045.000 Sedang Realisasinya Sebesar Rp. 149.499.286.177 atau Capaiannya 82,32 %.

- 3.2.11. Sasaran kesebelas yaitu meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebagai berikut:

Tabel 3.27 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,56	66	68,67	104,05%	77,5	88,6

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH mencakup tiga parameter yaitu angka indeks kualitas udara, angka indeks kualitas air dan angka indeks tutupan lahan/vegetasi dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Angka Indeks Kualitas Udara (bobot 30%)

2. Angka Indeks Kualitas Air (bobot 30%).
3. Angka Indeks Tutupan Vegetasi/Hutan (bobot 40%).

Perhitungan IKLH tahun 2017 sebagai berikut :

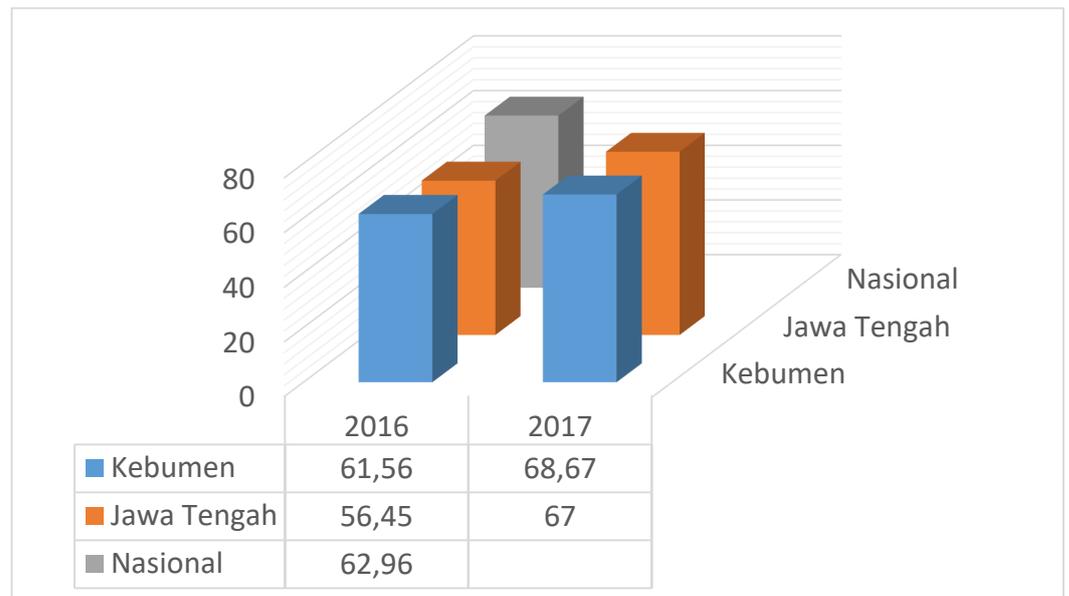
No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil (Nilai X bobot)
1	Indeks Kualitas Air	56,67	30	17,00
2	Indeks Kualitas Udara	93,30	30	27,99
3	Indek Tutupan hutan/vegetasi	59,21	40	23,68
	IKLH			68,67

Dari target IKLH yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 66%, realisasi mencapai 68,67% (prosentase capaian kinerja sebesar 104,05% atau capaian kinerja dengan kriteria **Sangat Baik**). Berdasarkan klasifikasi kualitatif IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka tersebut kategori “Cukup”, sebagaimana table berikut :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
Unggul			X	>	90
Sangat Baik	82	<	X	≤	90
Baik	74	<	X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada			X	<	50

Sumber : *IKLH Pusat 2014, 2017*

Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar Grafik 3.19 Perbandingan IKLH

*) *Belum adanya sumber data.*

Capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2017, apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, terdapat selisih positif sebesar 1,67%, (perbandingan IKLH tahun 2017 dengan IKLH nasional belum dapat disandingkan terkait belum adanya sumber dari Pusata).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian IKLH di Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian LHK di Kabupaten Kebumen terhadap kualitas udara sebagai salah satu parameter penghitungan IKLH, menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 93,30% dari target tahun 2017 sebesar 75%, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap capaian IKLH tahun 2017.
2. Dukungan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berdampak langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup (terutama kualitas air dan udara), antara lain berupa pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, pembangunan

kawasan kumuh perkotaan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran polusi, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dan adanya dukungan serta peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKLH tahun 2017 meliputi: Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program lingkungan sehat perumahan, Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sedangkan alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran indikator IKLH Kebumen tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 20.890.045.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.245.571.219 (72,98%). Adanya efisiensi sebesar 27,02%, disebabkan adanya sisa pengadaan barang/jasa (sisa tender).

- 3.2.12. Sasaran kedua belas yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat, dengan indikator Angka Kemiskinan.

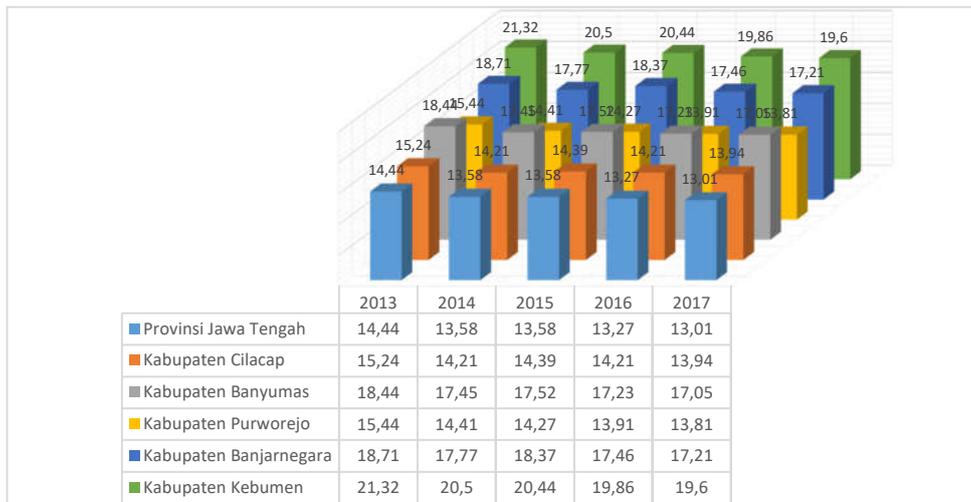
Angka Kemiskinan merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPS. Realisasi dan capaian indikator kinerja angka kemiskinan tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kemiskinan	19,86%	18,50	19,60	94,05%	15,45	73,14%

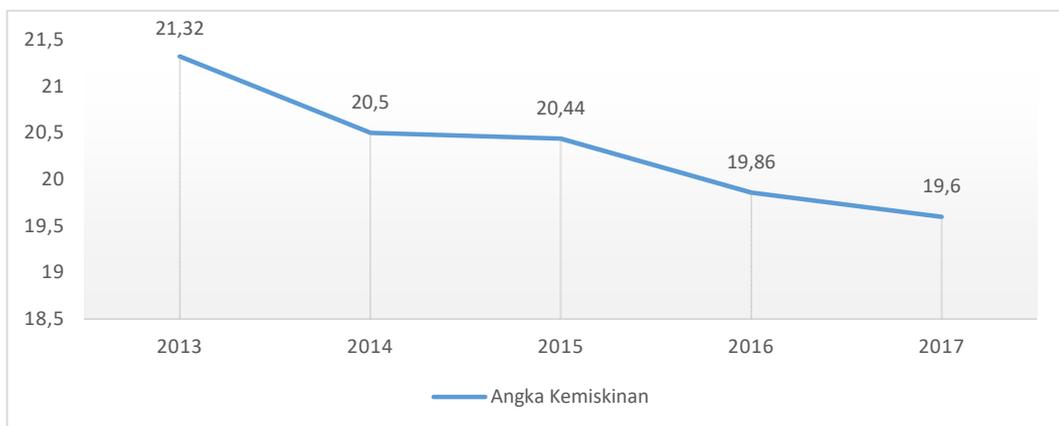
Capaian kinerja untuk angka kemiskinan tahun 2017 sebagaimana table diatas mencapai 94,05 % atau kriteria capaian kinerja **Baik**, walaupun tidak mencapai target angka kemiskinan telah berkurang 1,72 dari angka kemiskinan tahun 2013 (lihat pada Grafik 3. Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen). Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan telah berhasil walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah atau Kabupaten tetangga cenderung lebih tinggi, akan tetapi angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada jalur positif artinya bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kebumen semakin menurun. Berikut perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Tetangga dan Jawa Tengah:



Gambar Grafik 3.20 Perbandingan Angka Kemiskinan Se- Kedu

Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen masih tinggi, namun demikian angka kemiskinan tersebut cenderung mengalami penurunan hal ini dapat diketahui dari angka kemiskinan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana gambar grafik berikut:



Gambar Grafik 3.21 Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2013 -2017

Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melibatkan beberapa perangkat daerah, adapun usaha yang telah dilaksanakan adalah:



- a. Membentuk Rumah Harapan (UPTP2K pada tahun 2016 yang dikelola oleh Pokja Data)
- b. Keterpaduan Data TKP2Kdes
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin berdasarkan cluster, yang mana untuk cluster 1 dan 2 dilaksanakan dengan program *social safety net* (jaringan pengaman sosial), perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengatasi kerentanan contohnya : Program Keluarga Harapan (PKH), Program Subsidi Beras (RASTRA), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada cluster 3 dan 4 diberi program pemberdayaan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang akan diberi 20 juta (dari pusat) atau 30 juta (dari daerah) .

Setelah pemberdayaan masyarakat, nantinya masyarakat miskin akan difasilitasi dengan program pinjaman murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pemberian ketrampilan ketrampilan usaha.

- d. Dalam rangka mencapai program tepat sasaran maka dilaksanakan verifikasi dan validasi data miskin melalui dua cara, antara lain :

- 1) Data program : pembaharuan data yang dilaksanakan sebulan sekali, desa/ kelurahan diminta mengusulkan data miskin yang tidak sesuai setiap bulannya per tanggal 10
- 2) Data base : pembaharuan data yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, vervali perubahan data

diusulkan ke pusat untuk mengamodasi inclusion error dan exclusion error. Dalam rangka verval data, maka mulai tahun 2018 dilaksanakan pendataan data penduduk miskin yang terintegrasi antara TKP2KDes (data lokal) dengan data MPM (data pusat).

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menurunkan angka kemiskinan:

- a. Masih Kurangnya Koordinasi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan
- b. Masih ditemukan tumpang tindih program dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c. Masih adanya beberapa sumber data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan dengan kriteria yang berbeda
- d. Kepala Desa yang diberi wewenang di tingkat desa belum berani bersikap tegas terhadap penentuan data rumah tangga miskin

Solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan :

- a. Melaksanakan Amanat Perda No 20 tahun 2012 salah satunya adalah Membentuk TKP2KDes di setiap desa, dan pemutakhiran data penduduk miskin setiap tahun;
- b. Membuat skala program pengentasan kemiskinan yang komprehensif dengan jangka waktu 3 tahun
- c. Peningkatan anggaran APBD pada sektor pengentasan kemiskinan
- d. Sumber data yang digunakan sebagai dasar harus valid dan bersumber pada satu data

- e. Sinkronisasi program pengentasan kemiskinan dengan OPD terkait dengan satu sumber data kemiskinan
- f. Diperlukan adanya lembaga diskresi di atas desa yang bisa focus mengambil keputusan penetapan data rumah tangga miskin

Program **yang** sudah direncanakan antarlain: Program CSR dalam pengentasan kemiskinan (Anggaran : 6 milyar), Program KUBE dengan APBD Kabupaten (Anggaran : 20 milyar/tahun), Program KUBE Pusat (Anggaran : 2 milyar).

3.2.13. Sasaran ketiga belas yaitu Meningkatnya keterserapan tenaga kerja. Indikator sasaran ini adalah Angka pengangguran.

Angka Pengangguran dihitung dengan rumus Jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi Jumlah angkatan kerja di kalikan seratus prosen.

Pada tahun 2017 data angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja sebagai berikut:

Tabel 3.29 Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja
2017	24.279	631.029

Sumber Data: Dinas Naker KUKM Kab. Kebumen 2017

Dari table angkatan kerja di atas dapat diketahui capaian angka pengangguran tahun 2017 adalah:

Tabel 3.30 Capaian Angka Pengangguran

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Pengangguran	4,14%	2,05%	3,85%*	12,20 %	1,97	51,16%

Keterangan : * Dinas Naker KUKM Kab. Kebumen 2017

Capaian kinerja Angka Pengangguran tidak mencapai target atau hanya mencapai 12,20% atau termasuk capaian kinerja dengan kriteria **Kurang**. Apabila dibandingkan data Angka Pengangguran dari BPS, angka pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen tahun 2017 mencapai 5,58%.

Permasalahan yang menjadi penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja antara lain:

1. Rendahnya kualitas / kompetensi tenaga Kerja;
2. Rendahnya Keterserapan tenaga Kerja;
3. Perusahaan masih belum sepenuhnya melaporkan data ketenagakerjaan;

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan datang:

1. Meningkatkan pelatihan pelatihan yang berbasis kompetensi sehingga siap di dunia kerja.
2. Memaksimalkan kegiatan Bursa Kerja / Job Fair sebagai wadah Pencaker dalam mencari Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Pencaker dengan menambah kuota Pencaker dan Perusahaan yang mengikuti Job Fair

- 3.2.14. Sasaran keempat belas adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator sasaran yaitu persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

Indikator sasaran yaitu Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik dihitung dari (Prosentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini (dalam kondisi baik + Prosentase gedung Sekolah Dasar)/sederajat dalam kondisi baik + Prosentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik) dibagi tiga.

Berikut adalah jumlah gedung dalam kondisi baik dan jumlah total gedung PAUD/ SD/ SMP atau yang sederajat di Kabupaten Kebumen:

Tabel 3.31 Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen

Tahun	Jumlah gedung PAUD/sederajat kondisi baik	Jumlah Total gedung PAUD/sederajat	Jumlah gedung SD/sederajat kondisi baik	Jumlah total gedung SD/sederajat	Jumlah gedung SMP/sederajat kondisi baik	Jumlah total gedung SMP/sederajat
2015	509	675	652	910	158	196
2016	523	679	675	912	169	200
2017	538	680	687	911	175	202

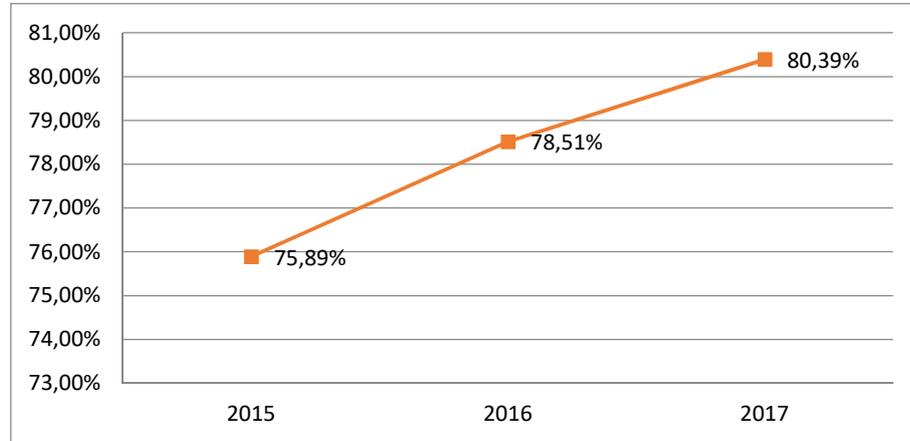
Dari data tersebut realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.32 Capaian Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik	78,51%	79,18	80,39	105,82%	83,87%	95,85%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 101,53% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 ada peningkatan dari capaian sebesar 78,51% menjadi 80,39%. Hal tersebut dikarenakan faktor yang mendukung keberhasilan terhadap capaian realisasi antara lain adalah Program pendidikan anak usia dini dan Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada kegiatan antara lain Pengadaan sarana peningkatan mutu SD, Pengadaan sarana peningkatan mutu SMP dan Bantuan Sosial pengadaan

sarana mutu PAUD dengan total anggaran sebesar Rp. 30.982.586.000,- yang terdiri dari Dana DAK dan dana APBD Kabupaten.



Gambar Grafik 3.22 Prosentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen 2015-2017

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun **hambatan** dalam pencapaian target salah satunya adalah serapan anggaran kegiatan pada beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh pelaksanaan dan penganggaran pada akhir tahun anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan diprogramkan pada tahun berikutnya.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik telah mencapai 95,85%. **Solusi** atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah mempersiapkan perencanaan dan data awal terhadap kebutuhan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan kantor serta terhadap perencanaan proses pengadaan pada tahun - tahun berikutnya, sehingga target yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

3.2.15. Sasaran kelima belas yaitu Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan

Sasaran ini diukur dengan indicator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Indikator sasaran ini dipengaruhi oleh :

1. Persentase Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. Capaian kinerja sub indicator ini mencapai 100% karena kebutuhan obat dan perbekalan obat dapat terpenuhi. Secara nasional obat yang menjadi indikator kebutuhan obat dan perbekalan obat sesuai dengan SPM Kesehatan bidang Farmasi ada 20 jenis obat, pada tahun 2017 Kabupaten Kebumen dapat memenuhi 20 jenis obat tersebut.
2. Persentase Puskesmas yang dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD) dengan capaian realisasi 100%.
3. Persentase jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan system manajemen kesehatan dengan capaian realisasi 100%.

Tahun 2017 target indicator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 94,5% dan realisasi tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja 105,82 % dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 lebih baik. Berikut capaian Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan:

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Tingkat akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	92,33%	94,5%	100%	105,82%	96%	104,16%

Realisasi Indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan pada tahun mencapai 100 % atau tingkat capaian kinerja 105,82% dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa semua puskesmas sudah tersedia obat minimal 20 item obat indikator yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain tingkat ketersediaan obat dalam awal bulan tidak ada 20 item, sarana prasarana (alat kesehatan) di Puskesmas mengalami kerusakan sehingga dalam penanganan kegawat daruratan ada kendala, kurangnya SDM Kesehatan yang menguasai manajemen.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tetap mencapai target akhir RPJMD 2021 adalah meningkatkan koordinasi dengan kementerian khususnya bidang Farmasi, rutin melakukan kalibrasi alat kesehatan dan pemenuhan alat

kesehatan sesuai dengan prosedur atau PMK 75 tahun 2014, mengusulkan pelatihan SDM kesehatan untuk penanganan kegawatdarutan

Pada tahun 2017 indikator ini didukung oleh 6 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 10.927.669.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.414.698.894,- (86, 15%)..

3.2.16. Sasaran keenam belas yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

3.2.16.1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian dari indicator ini selengkapnya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34 Capaian Nilai EKPPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,1	B >2 s.d ≤ 3	B 2,9728	100 %	B	99%

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD .Target yang ingin dicapai adalah nilai 3 atau tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya .Nilai EKPPD dalam bentuk keputusan Menteri Dalam Negeri tentang status dan kinerja pemerintahan daerah . Untuk EKPPD tahun 2016 belum diterbitkan SK mendagri sampai dengan saat laporan ini di susun. Akan tetapi hasil

penilaian oleh tim daerah yang disampaikan pada saat konsultasi di Biro Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 2,9728 atau capaian kinerja sebesar 99 % dengan kriteria capaian kinerja **Baik**.

Sesuai dengan Metode EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016 capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

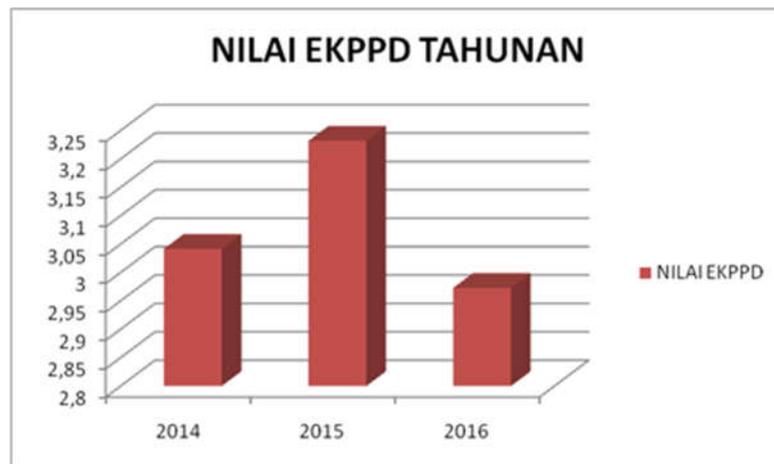
Σ Skor $3 < ST \leq 4$ mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST) 3

Σ Skor $2 < T \leq 3$ mendapat prestasi Tinggi (T)

Σ Skor $1 < S \leq 2$ mendapat prestasi Sedang (S)

Σ Skor $0 \leq R \leq 1$ mendapat prestasi Rendah (R)

Realisasi capaian Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

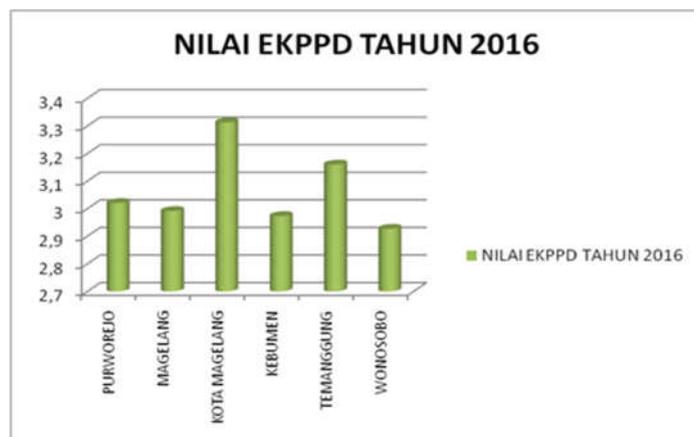


Gambar Grafik 3.23 Nilai EKPPD 2014-2016

Apabila dibandingkan Dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2016 untuk nilai EKPPD mencapai 3, 2232 atau skor sangat tinggi, maka pada tahun 2017 nilai EKPPD Kabupaten Kebumen mengalami penurunan menjadi 2,9728 atau skor tinggi. Adapun beberapa factor yang menjadi penyebab turunnya nilai EKPPD sehingga tidak mencapai target antara lain:

1. Belum optimalnya Kemampuan personil penyusun LPPD dalam memahami juknis pengisian IKK
2. Beberapa OPD belum melaksanakan evaluasi mandiri terhadap Laporan kinerja masing – masing OPD sebagai bahan yang akan di tuangkan dalam LPPD
3. Beberapa Data dukung IKK didukung atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung capaian kinerja ,sehingga dinyatakan tidak ada informasi ata “TDI “
4. Penyusunan LPPD bersamaan dengan penyusunan Laporan pemerintahan lainnya dengan format yang berbeda namun harus di laporkan maksimal akhir bulan maret , sehingga apabila personil penyusun LPPD dibebankan pada 1 atau 2 orang ,dalam hal ini hanya kasubbag perencanaan ataupun kasubbag pemerintahan dikecamatan , penyusunan LPPD tidak maksimal .

Apabila dibandingkan dengan wilayah kedu lainnya, Kota magelang memiliki nilai EKPPD tertinggi tahun 2016 dengan skor 3,2125, sedangkan Kabupaten dengan nilai EKPPD terendah di wilayah kedu dengan skor 2,9267 adalah Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Kebumen berada pada urutan ke 5 dari 6 Kabupaten se wilayah Kedu dengan nilai 2,9728. Dalam bentuk grafik dapat terlihat sebagai berikut :



Gambar Grafik 3.24 Perbandingan Nilai EKPPD Karisedenan Kedu 2016

Solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai target pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Setiap OPD melakukan evaluasi mandiri atas capaian IKK dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya
- b. Personil yang ditugaskan untuk pengisian / penyusunan LPPD dari masing masing OPD mengikuti tahapan penyusunan LPPD dari sosialisasi pengisian sampai dengan desk dan klarifikasi data yang dikirim
- c. Pengisian IKK sudah berdasarkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.16.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB. Realisasi dan Capaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC (54,35)	B (60)	CC (57,26)	95,43 %	B (60)	95,43%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen untuk 2017 belum mencapai target, atau capaian kinerja 95,43% dengan kriteria **Baik**. Walaupun nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen belum mencapai target yang ditetapkan (B) akan tetapi ada kenaikan point dari pada tahun sebelumnya.

Berikut grafik nilai akuntabilitas kinerja kabupaten kebumen tahun 2013 sampai dengan 2017:



Gambar Grafik 3.24 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2013-2017

Hal-hal yang masih menjadi kendala sehingga nilai akuntabilitas kinerja kabupaten tidak mencapai target tahun 2017, termuat dalam cacatan Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen antara lain meliputi :

- a. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/*cascade* dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV;
- b. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur;
- c. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;



- d. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin di capai;
- e. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja, **Solusi** yang direkomendasikan antara lain:

1. Melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*. Review sebagaimana dimaksud diatas, mencakup review atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.
2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/*cascade* dari dokumen perencanaan ditingkat daerah;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya;
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan

output tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;

5. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan ataupun sebaliknya.
6. Mendorong kemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sedangkan Alokasi anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp. 82.388.000,- terealisasi sebesar Rp 75.245.000,-.

3.2.16.3. Opini BPK atas LKPD

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2017 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2016 terealisasi WDP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2016 adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2015	WTP	WDP atas LKPD 2016	75%	WTP	75%



Capaian kinerja indicator Opini BPK atas LKPD sebesar 75% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Belum tercapainya target kinerja Opini BPK atas LKPD pada tahun 2017 dapat disebabkan masih Terdapat beberapa catatan dasar pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK atas Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyajikan belanja modal peralatan mesin Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.99,18 Milyard, Belanja Modal gedung bangunan sebesar Rp.160,88 Milyard dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.360,1 Milyard. Realisasi tersebut antara lain dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan barang langsung atas usulan kegiatan yg bersumber dari Pokir DPRD.
2. Pemeriksaan uji petik atas paket pekerjaan usulan pokok-pokok pikiran DPRD senilai Rp.21,50 Milyard menunjukkan adanya kelemahan sistem Pengendalian Intern.

Hal tersebut menunjukkan bahwa :

1. Adanya Indikasi kelemahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, terkait integritas dari penyelenggara pemerintahan daerah, yang antara lain ditandai dengan :
 - a. Permintaan pokok-pokok pikiran DPRD menyimpang dari ketentuan karena disampaikan setelah RKPD ditetapkan Bupati;
 - b. Terdapat indikasi pengaturan pengadaan langsung sehingga Pemerintah Daerah berpotensi tidak mendapatkan harga yang kompetitif;



- c. Penyedia Barang/jasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran;
 - d. Kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan;
 - e. Pemahalan harga atas beberapa paket pekerjaan;
 - f. Tidak sesuai spesifikasi teknis pada beberapa paket pekerjaan; dan
 - g. Pemberian imbalan dari penyedia barang/jasa kepada anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran.
2. Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan :
- a. Pemahalan harga alat kesenian SD dan SMP sebesar Rp.52.200.000,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Kendaraan pada 8 SKPD sebesar Rp. 37.954.500,00
 - c. Terdapat ketekoran kas pada beberapa SKPD sebesar RP.63.074.384,00 dan Pemebrian Jasa dari Bank atas Pengelolaan Gaji Tidak sesuai ketentuan;
 - d. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Enam SKPD sebesar Rp.317.456.700,00;
 - e. Pengadaan media reklame billboard/baliho tidak sesuai spesifikasi;
 - f. Kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang sebesar Rp.253.616.500,00
 - g. Terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan PPh 21 sebesar Rp. 7.712.979.330,00 karena adanya PMK perubahan PTKP.

Solusi **dan Upaya-upaya** untuk mencapai Opini WTP di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah;

1. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Sidat Kedaton, SIM Gaji, SIPPAS, SP2D Online, dan Simbankeu.
2. Melakukan rekonsiliasi data keuangan secara rutin dengan OPD terkait.
3. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap mulai 2018.
4. Pilot project bagi OPD yang sudah dianggap mampu melakukan verifikasi SPJ secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi PPK guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
5. Penyelenggaraan BinteK dan Sosialisasi terkait pengelolaan keuangan dan Aset.
6. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Disamping hal-hal tersebut diatas **yang harus dilakukan oleh semua pihak** yaitu :

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan.
- c. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Perolehan Opini dari BPK atas LKPD dari tahun-tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun 2017 dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.37 Realisasi Nilai Opini BPK atas LKPD 2013-2017

Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP atas LKPD 2012	WDP atas LKPD 2013	WDP atas LKPD 2014	WTP atas LKPD 2015	WDP atas LKPD 2016

3.2.17. Sasaran ketujuh belas yaitu Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah didukung oleh indikator sasaran yaitu Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ.

Rumus perhitungan indicator sasaran ini adalah Jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS dibagi Jumlah Total ASN ditambah total Pegawai BUMD dikali seratus prosen.

Secara rinci jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat

Tahun	Jumlah ASN + Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS	Jumlah Total ASN + Pegawai BUMD
2017	5.012	12.531

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Tabel 3.39 Capaian Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Indikator Sasaran	Realisasi 2016	2017			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	44,81%	50%	39,98%	79,96%	79,96%	50%

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Pada sasaran ini pencapaian indikator sasaran belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2017 atau capaian kinerja 79,98% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Apabila dibandingkan dengan

tahun 2016 realisasi tahun 2017 lebih rendah, hal ini dikarenakan kesadaran ASN dan Pegawai BUMD untuk membayarkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat masih kurang, ASN dan Pegawai BUMD lebih memilih menyalurkan Zakatnya secara pribadi.

Solusi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang :

1. Mensosialisasikan kembali Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 451.1.2/0793 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Zakat kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Direktur BUMD.
2. Pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat Desa dengan harapan ASN dan Pegawai BUMD membayarkan zakat melalui UPZ tingkat Desa setempat.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 sebesar Rp 2.880.630.912.000,00-. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiscal sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
2. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak yang rasional dan proporsional;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sector swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiscal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/ anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi dan stabilitasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat public servis seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastuktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan social, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Akan tetapi, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, daerah harus dituntut untuk lebih kreatif dalam

meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanjanya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama mendominasi unsur Pendapatan Asli Daerah.

Agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berlangsung wajar dan tidak mengakibatkan distorsi terhadap sektor-sektor ekonomi daerah, maka proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pertumbuhan laba Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

Secara umum arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah Tahun 2017, dilakukan melalui upaya:

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;



- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja; dan
- g. perencanaan pendapatan yang lebih baik dan terukur dengan peningkatan kapasitas pendapatan daerah.

Adapun realisasi pendapatan daerah selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Realisasi Pendapatan Tahun 2017

Uraian Pendapatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a. Pendapatan Asli Daerah	437.343.224.000	441.537.732.813	100,96%
- Hasil Pajak Daerah	69.282.500.000	79.479.454.753	114,72%
- Hasil Retribusi Daerah	26.398.541.000	22.655.157.693	85,82%
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.550.875.000	21.901.327.127	101,63%
- Lain-lain Pendapatan PAD yang sah	320.111.308.000	317.501.793.240	99,18%
b. Pendapatan Transfer	2.300.474.283.000	2.264.290.535.216	98,43%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.751.748.429.000	1.712.419.381.173	97,75%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	411.139.813.000	410.881.003.800	99,94%
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	116.348.491.000	129.121.770.243	110,98%
- Bantuan Keuangan - LRA	21.237.550.000	11.868.380.000	55,88%
c. Lain-lain pendapatan yang sah	1.500.000.000	5.214.000.000	347,60%
- Pendapatan Hibah - LRA	1.500.000.000	5.214.000.000	347,60%
Jumlah Pendapatan Daerah	2.739.317.507.000	2.711.042.268.029	98,97%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2017

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan serta disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- c. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- d. Belanja daerah juga diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk meminimalisir sumber ketidakefisienan dan ketidakefektifan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- g. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang optimal dengan biaya seminimal mungkin;
- h. Penganggaran keuangan daerah diarahkan untuk dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD;

Realisasi belanja daerah tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.41 Realisasi Belanja daerah tahun 2017

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	1.823.288.922.000	1.678.033.681.238	92,03%
- Belanja Pegawai	1.207.271.477.000	1.110.662.713.079	92,00%
- Belanja Barang dan Jasa	510.886.654.000	476.472.310.220	93,26%
- Belanja Hibah	52.309.093.000	45.614.321.177	87,20%
- Belanja Bantuan Sosial	52.821.698.000	45.284.336.762	85,73%
b. Belanja Modal	532.146.856.000	433.698.055.660	81,50%
- Belanja Tanah	12.619.530.000	8.413.326.479	66,67%
- Belanja Peralatan dan Mesin	113.429.856.000	98.090.081.692	86,48%
- Belanja Gedung dan Bangunan	98.857.487.000	81.049.491.600	81,99%
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	294.407.086.000	229.346.847.905	77,90%
- Belanja Aset Tetap Lainnya	12.812.897.000	16.778.667.484	130,95%
- Belanja Aset Tak Berwujud	20.000.000	19.640.500	98,20%
c. Belanja Tidak Terduga	4.763.522.000	1.400.727.387	29,41%
- Belanja Tidak Terduga	4.763.522.000	1.400.727.387	29,41%
d. Transfer	520.431.612.000	517.138.843.400	99,37%
- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.928.250.000	6.844.582.800	98,79%
- Transfer Bagi Pendapatan Lainnya	2.924.486.000	2.897.883.000	99,09%
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	509.534.920.000	506.352.421.600	99,38%
- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.043.956.000	1.043.956.000	100,00%
Jumlah Belanja Daerah	2.880.630.912.000	2.630.271.307.685	91,31%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2017

3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran

Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang atau *balance*. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berusaha meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kebumen tahun 2017 diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) berupa penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus pada akhirnya diharapkan terjadi penambahan pendapatan dari pengembalian investasi atau deviden laba perusahaan daerah terhadap rekening pendapatan asli daerah. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kebumen diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk

menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.42 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017

Uraian Pembiayaan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a. Penerimaan Pembiayaan	162.412.405.000	162.392.405.489	99,99%
- Penggunaan SiLPA	160.912.405.000	160.912.405.489	100,00%
- Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000	1.480.000.000	98,67%
b. Pengeluaran Pembiayaan	21.099.000.000	21.099.000.000	100,00%
- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.599.000.000	19.599.000.000	100,00%
- Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pembiayaan Netto	141.313.405.000	141.293.405.489	99,99%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2017



BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 16 (enam belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 14 (empat belas) indikator sasaran atau 53,85 % pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 10 (sepuluh) indikator sasaran atau 38,46% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dua (dua) indikator sasaran atau 7,7% pencapaian dengan kriteria **Kurang**. Rata-rata realisasi capaian kinerja 95,46% atau bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 Baik. Namun demikian, ada 7 indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)
2. Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN
3. Angka Kemiskinan
4. Angka Pengangguran
5. Nilai akuntabilitas kinerja
6. Opini BPK atas LKPD
7. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

4.2. SOLUSI

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan perbaikan sangat dibutuhkan untuk penyusunan LKjIP yang lebih



baik. Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa solusi yang disarankan:

1. Pertumbuhan Perekonomian yang didasari Atas Dasar Harga Konstan dipengaruhi tidak hanya skala regional akan tetapi nasional dan juga global, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan anggaran pada program yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan perekonomian antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan), Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

Penerapan kebijakan daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas masyarakat
 - 1) Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan;
 - 2) Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
 - 3) Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
 - 4) Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan
 - 5) Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
- b. Meningkatkan daya saing
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
 - 2) Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
 - 3) Akselerasi pertumbuhan ekonomi.



- c. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial unggulan dan strategis
 - 1) Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal unggulan, potensial dan strategis melalui peningkatan implementasi OVOP (one village one product);
 - 2) Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal unggulan, potensial dan strategis;
 - 3) Mewujudkan kemandirian pangan.
2. Upaya untuk meningkatkan Investasi PMA/ PMDN dilakukan dengan cara menyusun Standarisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal di daerah serta meningkatkan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.
3. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan diantaranya dengan Pemberdayaan masyarakat miskin berdasarkan cluster, yang mana untuk cluster 1 dan 2 dilaksanakan dengan program *social safety net* (jaringan pengaman sosial), perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengatasi kerentanan contohnya : Program Keluarga Harapan (PKH), Program Subsidi Beras (RASTRA), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada cluster 3 dan 4 diberi program pemberdayaan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang akan diberi 20 juta (dari pusat) atau 30 juta (dari daerah).
4. Jumlah lowongan angkata kerja local masih sedikit dan rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan permasalahan dalam upaya menurunkan angka pengangguran, upaya yang



dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain dengan meningkatkan pelatihan pelatihan yang berbasis kompetensi sehingga siap di dunia kerja dan memaksimalkan kegiatan Bursa Kerja / Job Fair sebagai wadah Pencaker dalam mencari Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Pencaker dengan menambah kuota Pencaker dan Perusahaan yang mengikuti Job Fair.

5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai Nilai akuntabilitas kinerja yang ditargetkan diantaranya dengan menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan harapan Perbup tersebut menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural dalam melaksanakan dan melaporkan akuntabilitas kinerja. Tidak hanya dari segi formal upaya yang dilaksanakan, akan tetapi juga segi peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan memberikan Bimbingan teknis tentang SAKIP dan melengkapi SAKIP dengan system e-sakip.kabkebumen.go.id.
6. Opini BPK atas LKPD tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan diantaranya membangun Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, meingkatkan peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan dan perbaiki yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
7. Meningkatkan PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ dengan cara Mensosialisasikan kembali Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 451.1.2/0793 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pelaksanaan



Zakat kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Direktur BUMD dan pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat Desa dengan harapan ASN dan Pegawai BUMD membayarkan zakat melalui UPZ tingkat Desa setempat.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun anggaran 2017, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT

Jln. Arungbinang No. 16 Telp.(0287) 381437

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid .

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Kebumen , 27 Maret 2017

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MAHMUD FAUZI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610109 199102 1 002



BUPATI KEBUMEN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, S.E.

Jabatan : Bupati Kebumen

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kebumen, September 2017

BUPATI KEBUMEN


Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, S.E.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI

KABUPATEN : KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN : 2017

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA MURNI	TARGET KINERJA PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,54	12,54
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	7,02	7,02
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	56,495	56,495
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	46,79	46,79
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,85	72,85
		6. Angka Kematian Ibu	95	95
		7. Angka Kematian Bayi	11,00	11,00
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100	100
		9. Cakupan Penanganan KasusKasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	27,56	27,56
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hokum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	750	750
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	5,89	5,89
		12. Pendapatan perkapita penduduk	19.715,60	19.715,60
		13. Rasio/Indeks Gini	0,23	0,23
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	2 Unit	2 Unit

1	2	3	4	5
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	5%	5%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	17,01%	17,01%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	54,83%	54,83%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,00	66,00
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	18,50 %	18,50 %
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,05 %	2,05 %
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	79,03 %	79,03 %
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	94,50 %	94,50 %
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	B	B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	50,00 %	50,00 %

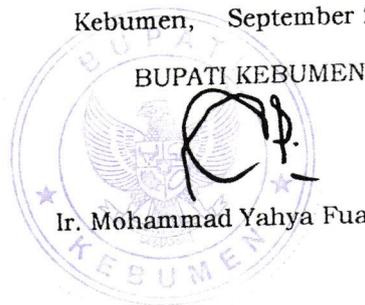
No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	5.033.000.000	3.141.833.000
2	Program BLUD	161.161.809.000	189.854.340.000
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	170.000.000	166.450.000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	45.000.000	45.000.000
5	Program Keluarga Berencana	3.945.540.000	3.785.536.000
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.153.000.000	947.827.000
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	17.118.303.000	17.868.350.000
8	Program kerjasama informasi dengan mas media	4.279.800.000	4.127.873.000
9	Program Kerjasama Pembangunan	130.000.000	135.000.000
10	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94.500.000	80.772.000
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	136.000.000	286.000.000
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	595.000.000	788.354.000
13	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	50.000.000	50.000.000
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	17.822.676.000	17.884.655.000
15	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	220.000.000	173.263.000
16	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	340.978.000	355.978.000
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.582.236.000	45.361.786.000
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4.804.070.000	3.247.094.000
19	Program pelayanan kontrasepsi	240.000.000	183.000.000
20	Program Pelayanan Usaha Perikanan	192.000.000	224.616.000
21	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	21.407.344.000	11.377.706.000
22	Program pembangunan jalan dan jembatan	8.900.000.000	9.032.960.000
23	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	60.000.000	59.437.000
24	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.060.214.000	4.595.214.000
25	Program pembangunan turap/talud/bronjong	10.173.000	10.173.000
26	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.000.000.000	906.048.000
27	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	790.000.000	688.166.000
28	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	47.000.000	39.170.000
29	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	252.066.000	250.366.000
30	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1.732.821.000	2.463.510.000
31	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.022.250.000	1.000.000.000
32	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	3.465.197.000	3.217.535.000
33	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	11.131.510.000	10.704.060.000
34	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100.000.000	100.000.000
35	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	400.000.000	268.400.000
36	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	200.000.000	225.000.000
37	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	50.000.000	110.000.000
38	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	150.000.000	160.000.000
39	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	895.309.000	1.154.709.000
40	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	50.000.000	65.000.000
41	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.111.557.000	5.270.890.000
42	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	200.000.000	167.862.000
43	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	250.000.000	525.713.000
44	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.458.165.000	2.780.723.000
45	Program penataan struktur industri	300.000.000	383.025.000
46	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	773.000.000	649.078.000
47	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	523.500.000	551.840.000

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
48	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.272.282.000	1.247.057.000
49	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.517.250.000	672.684.000
50	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.859.063.000	5.321.971.000
51	Program Pendidikan Kedinasan	1.440.000.000	1.358.585.000
52	Program Pendidikan Non Formal	769.709.000	700.654.000
53	Program pendidikan politik masyarakat	180.000.000	249.500.000
54	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	22.709.068.000	24.790.198.000
55	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	34.214.970.000	36.455.335.000
56	Program Pengawasan Obat dan Makanan	470.000.000	469.485.000
57	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	260.000.000	259.120.000
58	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	920.000.000	914.030.000
59	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.385.000.000	10.427.000.000
60	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	649.500.000	707.500.000
61	Program pengembangan budidaya perikanan	5.458.713.000	5.012.288.000
62	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	22.376.331.000	23.837.788.000
63	Program pengembangan data/informasi	2.199.157.000	2.002.736.000
64	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.177.185.000	1.011.343.000
65	Program pengembangan destinasi pariwisata	17.249.346.000	15.933.446.000
66	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.343.506.000	1.367.302.000
67	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	100.000.000	72.943.000
68	Program pengembangan Kemitraan	820.000.000	820.000.000
69	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.365.000.000	1.099.780.000
70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.320.640.000	9.035.000.000
71	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.623.000.000	8.087.854.000
72	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.065.000.000	5.978.703.000
73	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	505.000.000	475.150.000
74	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.753.493.000	1.866.391.000
75	Program pengembangan pemasaran pariwisata	875.000.000	1.016.860.000
76	Program pengembangan perikanan tangkap	2.143.500.000	2.028.610.000
77	Program Pengembangan Perumahan	1.510.750.000	1.522.941.000
78	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	244.000.000	179.484.000
79	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	200.000.000	175.388.000
80	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.635.500.000	2.386.805.000
81	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	803.000.000	1.608.000.000
82	Program pengembangan wilayah transmigrasi	250.000.000	275.000.000
83	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	11.000.000.000	10.987.465.000
84	Program Pengendalian Banjir	28.632.236.000	13.458.496.000
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	4.057.051.000	3.613.792.000
86	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	110.000.000	110.000.000
87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.336.925.000	1.829.325.000

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
88	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1.651.000.000	201.320.000
89	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	390.000.000	349.111.000
90	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	140.000.000	140.000.000
91	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.812.753.000	9.675.379.000
92	Program peningkatan disiplin aparatur	647.150.000	565.470.000
93	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	13.820.200.000	14.305.430.000
94	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	151.088.960.000	117.783.740.000
95	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	617.991.000	515.780.000
96	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	30.000.000	29.645.000
97	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	570.000.000	567.500.000
98	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	6.130.201.000	9.004.616.000
99	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	511.000.000	360.000.000
100	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.656.000.000	1.368.497.000
101	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.396.687.000	3.236.295.000
102	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.669.140.000	945.156.000
103	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.000.000	43.260.000
104	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	700.000.000	672.221.000
105	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.524.200.000	1.399.200.000
106	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	150.000.000	150.000.000
107	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	12.387.111.000	12.157.385.000
108	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	264.370.000
109	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.411.482.000	5.371.532.000
110	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	104.000.000	98.750.000
111	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	676.669.000	535.562.000
112	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	353.500.000	353.175.000
113	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.995.740.000	8.502.700.000
114	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2.564.492.000	2.439.699.000
115	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	473.000.000	448.164.000
116	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	450.000.000	434.510.000
117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	150.000.000	144.832.000
118	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	250.000.000	249.710.000
119	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	174.000.000	170.000.000
120	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.575.000.000	2.568.619.000
121	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	385.000.000	373.883.000
122	Program peningkatan pengendalian polusi	70.000.000	69.500.000
123	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	2.376.226.000	2.358.703.000
124	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	150.000.000	112.663.000
125	Program peningkatan peran serta kepemudaan	684.073.000	1.020.418.000
126	Program peningkatan produksi hasil peternakan	5.300.000.000	5.247.800.000
127	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.579.000.000	1.990.791.000
128	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	128.730.000	238.730.000
129	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	715.000.000	632.515.000
130	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.603.381.000	57.737.558.000
131	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	7.323.500.000	7.290.490.000
132	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.501.271.000	2.726.871.000

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
133	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.170.663.000	3.428.245.000
134	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	173.000.000	173.000.000
135	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	100.000.000	54.726.000
136	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	280.000.000	150.880.000
137	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.288.600.000	1.722.460.000
138	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	220.000.000	200.718.000
139	Program perencanaan pembangunan daerah	1.910.596.000	1.959.214.000
140	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.120.200.000	974.080.000
141	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	30.000.000	26.820.000
142	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	300.000.000	282.165.000
143	Program perencanaan sosial dan budaya	760.000.000	694.360.000
144	Program Perencanaan Tata Ruang	550.000.000	540.000.000
145	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000	99.000.000
146	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	290.000.000	202.304.000
147	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	140.000.000	140.000.000
148	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	478.750.000	480.814.000
149	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	350.000.000	460.452.000
150	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	456.000.000	451.000.000
151	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	49.859.717.000	117.594.869.000
152	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	250.000.000	215.610.000
153	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.988.152.000	3.955.949.000
154	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	1.000.000.000	985.000.000
155	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.680.808.000	22.852.717.000
156	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	2.750.000	2.750.000
157	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	34.510.674.000	158.805.929.000
	Jumlah	965.466.560.000	1.136.134.933.000

Kebumen, September 2017



Ir. Mohammad Yahya Fuad, S.E.

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN : 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,61	100,56%
	2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,02	7,05	100,43%
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	56,49	61,49	108,85%
Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	46,79	50	106,86%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Angka	72,85	72,87	100,03%
	6. Angka Kematian Ibu	Angka	95	61,38	135,39%
	7. Angka Kematian Bayi	Angka	11,00	7,21	134,45%
Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100,00%
	9. Cakupan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	27,56	31,44	114,08%
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	Kasus	750	750	100,00%
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	%	5,89	5,87	99,66%
	12 Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	Rp	19.715.600,00	20.370.000	103,32%
	13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,23	0,23	100,00%
	14. Terbangunnya kawasan pemba- ngunan ekonomi	Unit	2	2	100,00%
Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan inves- tasi PMA/ PMDN	%	5,0	-18,35%	-3,67%
Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	17,01	19,05	111,99%
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	54,83	55,77	101,71%
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	66,00	68,67	104,05%
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18,50	19,6	94,05%
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,05	3,85	12,20%
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	79,03	80,39	101,72%
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	94,50	100	105,82%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B >2 s.d < 3	B 2,9728	100,00%
	24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	CC	95,43%
	25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WDP	75,00%
Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	50,00	39,98	79,96%

Kebumen, Maret 2018
WAKIL BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas										
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	1.221	1.238	1.254	1.271	1.287	1.304	1.320	1.320
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	693	698	702	707	711	716	720	720
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	5.330	5.474	5.649	5.804	5.955	6.147	6.339	6.339
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	3.878	4.423	4.679	5.353	5.609	5.865	6.538	6.538
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	7.277	7.281	7.285	7.289	7.293	7.297	7.301	7.301
		6. Angka Kematian Ibu	6.848	100	95	90	85	75	68	68
		7. Angka Kematian Bayi	1.050	1.100	1.100	1.090	1.090	1.075	1.050	1.050
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat										
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	2.366	2.504	2.756	3.009	3.261	3.513	3.765	3.765

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	867	800	750	700	650	600	500	500
<i>Misi 3</i> : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat										
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	583	586	589	591	594	597	600	600
		12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16,98367	18,34963	19,71560	21,08157	22,44754	23,81351	25,17948	25,17948
		13. Rasio/Indeks Gini	024	023	023	022	022	021	021	021
		14. Terbangunnya kawasan pemba- ngunan ekonomi	-	1	2	4	4	5	6	6
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan inves- tasi PMA/ PMDN	0	0	50	60	60	60	60	60
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	1.673	1.680	1.701	1.746	1.790	1.880	1.969	1.969
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	4.909	5.268	5.483	5.700	5.943	6.188	6.288	6.288

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumber daya hutan, sumberdaya pesisir berdasar-kan azas konser-vasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	5.992	6.300	6.600	6.900	7.475	7.600	7.750	7.750
<i>Misi 4</i> : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan										
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	2.002	1.926	1.850	1.774	1.698	1.622	1.545	1.545
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	209	207	205	203	201	199	197	197
<i>Misi 5</i> : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat										
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	7.664	7.740	7.903	8.003	8.141	8.273	8.387	8.387

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	9.000	9.400	9.450	9.500	9.550	9.600	9.600	9.600
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama										
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	B	B	B	B	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	B
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021